



INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA

PROVINSI PAPUA

2020



INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA 2020

ISBN : 978-602-0963-75-4
No. Publikasi : 94000.2134
Katalog BPS : 2302004.94
Ukuran Buku : A4 (21 x 29,7 cm)
Jumlah Halaman : viii+76 Halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Diterbitkan Oleh:

©Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Dicetak Oleh:

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Papua (UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 43 huruf b)

KATA PENGANTAR

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) adalah survei yang mencakup seluruh wilayah Indonesia dan diharapkan dapat memonitor dinamika ketenagakerjaan secara lebih cepat dan berkesinambungan. Sakernas Semester I (Februari) dapat menghasilkan angka estimasi nasional sampai dengan level provinsi, sedangkan Sakernas Semester II (Agustus) dengan jumlah sampel yang lebih banyak mampu menyajikan angka estimasi hingga tingkat kabupaten/kota.

Pada tahun 2021, BPS Provinsi Papua menerbitkan publikasi Indikator Pasar Tenaga Kerja Papua dengan kondisi Agustus 2020. Dalam publikasi ini menyajikan *Key Indicator of the Labour Market* (KILM) yang merupakan Indikator-indikator yang direkomendasikan ILO, dengan harapan bisa dijadikan sebagai sistem peringatan dini (*early warning sytem*) mengenai kondisi pasar tenaga kerja di Provinsi Papua. Jenis tabel yang ditampilkan dalam publikasi ini dirinci menurut jenis kelamin, klasifikasi perkotaan dan perdesaan, serta hanya mencakup penduduk usia kerja. Beberapa indikator KILM menurut kabupaten/kota dan tabel pendukung dalam indikator KILM yang ditetapkan, disajikan pada lampiran publikasi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini, disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Kritik dan saran dari pengguna sangat diharapkan demi penyesuaian terhadap publikasi edisi berikutnya.

Jayapura, Agustus 2021
Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua,



Adriana Helena Carolina, S.E., M.M.
NIP. 19660408 199212 2 001

ORGANISASI PENULISAN

Penanggung Jawab

Adriana Helena Carolina, S.E., M.M.

Editor

Sugiyanto, S.ST.,M.Si.

Pengolah Data

Aditya Hans Pradipta, S.ST.

Penulis

Erfal Andika Tarigan, S.ST.

Layout

Aditya Hans Pradipta, S.ST.

Desain Cover

Aditya Hans Pradipta, S.ST.

Sumber Ilustrasi pada Cover

freepik.com

<https://papua.bps.go.id>

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Organisasi Penulisan	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Lampiran	vii
Daftar Istilah dan Singkatan	viii
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1 Sakernas dan Analisis Ketenagakerjaan	1
1.2 Sakernas dan KILM	2
1.3 Peran KILM dalam Ketenagakerjaan	5
1.4 Analisis Pasar Tenaga Kerja Menggunakan KILM	6
Bab 2 Penjelasan Teknis	9
2.1 Penjelasan Umum	9
2.2 Indikator Pasar Tenaga Kerja	12
2.2.1 Partisipasi di Dunia Kerja	13
2.2.2 Indikator Pekerja	14
2.2.3 Indikator Pengangguran, <i>Under-Employment</i> , dan Ketidakaktifan	17
2.2.4 Indikator Pendidikan dan Melek Huruf	20
2.2.5 Indikator Upah dan Biaya Tenaga Kerja	20
2.2.6 Produktifitas Tenaga Kerja	20
2.2.7 Indikator Elastisitas Tenaga Kerja	21
2.2.8 Indikator Kemiskinan, Pekerja Miskin, dan Distribusi Pendapatan	21
Bab 3 Indikator Pasar Tenaga Kerja	23
3.1 Partisipasi di Dunia Kerja	23
3.2 Indikator Pekerja	27
3.3 Indikator Pengangguran, <i>Under-Employment</i> , dan Ketidakaktifan	42
3.4 Indikator Pendidikan dan Melek Huruf	51
Lampiran	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Sakernas Tahun 2018-2010	24
Tabel 2	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur, 2018-2020	28
Tabel 3	Rasio Penduduk Bekerja (EPR) terhadap Total Penduduk Usia Kerja, 2018-2020	29
Tabel 4	Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2019-2020	31
Tabel 5	Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan, 2019-2020	34
Tabel 6	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Penggunaan Waktu, 2019-2020	36
Tabel 7	Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, 2020	38
Tabel 8	Jumlah dan Persentase Pekerja Menurut Sektor, 2019-2020	40
Tabel 9	Indikator Pengangguran Papua, 2019-2020	43
Tabel 10	Indikator Pengangguran Usia Muda di Papua, 2019-2020	45
Tabel 11	TPT Menurut Tingkat Pendidikan, 2019-2020	47
Tabel 12	Indikator Setengah Penganggur, 2019-2020	49
Tabel 13	Indikator Ketidakaktifan, 2019-2020	50
Tabel 14	Indikator Ketidakaktifan Menurut Pendidikan, 2019-2020	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Diagram Ketenagakerjaan	9
Gambar 2	Pola TPAK Menurut Kelompok Umur, 2019-2020	25
Gambar 3	TPAK Menurut Kabupaten/Kota Agustus 2020	26
Gambar 4	Pola EPR Menurut Kelompok Umur Agustus 2020	29
Gambar 5	Pola EPR Kabupaten/Kota, Agustus 2020	30
Gambar 6	Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Pekerja Rentan Menurut Kabupaten/Kota, 2020	33
Gambar 7	Persentase Pekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Kabupaten/Kota, 2020	35
Gambar 8	Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Kabupaten/Kota, 2020	37
Gambar 9	Persentase Pekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2020	39
Gambar 10	Persentase Pekerja Menurut Sektor dan Kabupaten/Kota, 2020	41
Gambar 11	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota, 2020	44
Gambar 12	Persentase Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan dan Kabupaten/Kota, 2020	48
Gambar 13	Pola Tingkat Ketidaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2020	51

LAMPIRAN

Lampiran 1	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2019	54
Lampiran 2	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kelompok Umur Tahun 2017 dan 2019	55
Lampiran 3	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2019	56
Lampiran 4	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur, 2018 – 2020	57
Lampiran 5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2020	58
Lampiran 6	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2020	59
Lampiran 7	Ratio Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2020	60
Lampiran 8	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pekerjaan Utama, 2020	61
Lampiran 9	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pekerjaan Utama, 2020	63
Lampiran 10	Indikator Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Pekerja Paruh Waktu Menurut Kabupaten/Kota, 2020	64
Lampiran 11	Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Jam Kerja, 2020	65
Lampiran 12	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Formal-Informal, 2020	68
Lampiran 13	Pola Tingkat Ketidaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2020	69
Lampiran 14	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2020	70
Lampiran 15	Persentase Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2020	71
Lampiran 16	Persentase Setengah Penganggur Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2020	72
Lampiran 17	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2020	73
Lampiran 18	Tingkat Ketidaktifan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Tahun 2020	74
Lampiran 19	Persentase Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2020	75
Lampiran 20	Tabulasi Silang Batas Kegiatan Formal dan Informal Berdasarkan Status Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan Utama	76

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN (AKRONIM)

AK	Angkatan Kerja
BAK	Bukan Angkatan Kerja
BPS	Badan Pusat Statistik
EPR	<i>Employment-to-Population Ratio</i>
ICLS	<i>The International Conference of Labour Statisticians</i>
ILO	<i>International Labor Organization</i>
ISCED	<i>International Standard Classification of Education</i>
ISIC	<i>International Standard Industrial Classification</i>
KBLI	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KILM	<i>Key Indicator of The Labor Market</i>
MDG's	<i>Millenium Development Goals</i>
OECD	<i>Organisation for Economic Co-Operation and Development</i>
Sakernas	Survei Angkatan kerja Nasional
SP	Sensus Penduduk
STP	Setengah Penganggur
SUPAS	Survey Penduduk Antar Sensus
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

BAB I

PENDAHULUAN

Papua adalah wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Di atas tanah Papua, terhampar hutan lebat yang menjadi rumah bagi beraneka ragam jenis flora dan fauna. Di bawah permukaan tanah terkandung berbagai macam jenis bahan tambang yang belum semua tereksplorasi. Berbagai macam jenis ikan, terumbu karang, dan biota laut lainnya juga hidup di perairan Papua. Semua kekayaan alam tersebut memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Menjadikan Papua sebagai magnet ekonomi bagi para investor lokal maupun manca negara.

Eksplorasi sumber daya alam Papua yang selama ini dilakukan perusahaan nasional dan multinasional tidak dipungkiri menyerap banyak tenaga kerja. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Papua, untuk menyiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pasar tenaga kerja. Tingkat Pendidikan dan keahlian yang sesuai menjadi prasyarat agar tenaga kerja dapat siap pakai. Tetapi menyiapkan tenaga kerja yang terampil tidak semudah membalikan telapak tangan. Butuh waktu lama untuk mewujudkannya.

Dibutuhkan data-data pendukung yang mampu memberikan gambaran menyeluruh terkait kondisi ketenagakerjaan di Papua. Data yang dimaksud seperti jumlah angkatan kerja, jumlah pekerja menurut lapangan pekerjaan dan status pekerjaan, jumlah pengangguran, kualitas tenaga kerja, pendapatan/gaji/upah dari pekerja, dan lainnya. Dengan menganalisis data-data ketenagakerjaan tersebut, kebijakan yang diambil pemerintah diharapkan mampu meningkatkan tenaga kerja yang siap pakai, meningkatkan jumlah lapangan kerja, dan menurunkan tingkat pengangguran.

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) merupakan survei yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik yang menghasilkan data-data ketenagakerjaan seperti yang telah disebutkan. Selain sebagai dasar pengambilan kebijakan, data Sakernas juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dari implementasi kebijakan ekonomi yang telah diambil. Untuk memudahkan pemahaman terhadap data ketenagakerjaan yang dihasilkan dari Sakernas Agustus 2020, BPS Provinsi Papua menerbitkan publikasi “Indikator Pasar Tenaga Kerja Provinsi Papua 2020”. Data dan indikator dalam publikasi ini diselaraskan dengan Indikator Kunci Tenaga Kerja atau *Key Indicator of the Labour Market* (KILM) yang merupakan Indikator-indikator Ketenagakerjaan yang direkomendasikan ILO (*International Labor Organization*).

1.1. SAKERNAS DAN ANALISIS KETENAGAKERJAAN

Untuk memperoleh data ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan sensus dan survei seperti: Sensus Penduduk (SP) Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Ekonomi Sosial Nasional (SUSENAS) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). Survei yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang menggambarkan keadaan ketenagakerjaan antar periode pencacahan adalah SAKERNAS.

Sakernas pertamakali dilaksanakan pada tahun 1976. Berbagai perubahan metodologi ataupun periode pencacahan telah terjadi. Tahun 1986 sampai 1993, Sakernas dilaksanakan secara triwulanan. Sejak tahun 1994 hingga 2001 dilaksanakan secara tahunan setiap bulan Agustus. Kemudian pada tahun 2002 sampai dengan 2004, selain dilaksanakan setiap tahun juga dilaksanakan secara triwulanan. Dan mulai tahun 2005 sampai tahun 2010 Sakernas berlangsung secara semesteran yaitu setiap bulan Februari dan Agustus.

Dengan semakin mendesaknya tuntutan data ketenagakerjaan baik variasi, kontinuitas, kemutakhiran dan keakuratan data yang dihasilkan, maka pengumpulan data Sakernas pada tahun 2011 dilakukan secara triwulanan yaitu bulan Februari, Mei, Agustus dan November yang dirancang untuk estimasi level provinsi. Sedangkan untuk estimasi level kabupaten/kota, pada triwulan 3 (bulan Agustus) ditambah sampel komplemen. Selanjutnya, Mulai tahun 2015 Sakernas kembali dilaksanakan secara semesteran yaitu pada bulan Februari (Sakernas Semester I) untuk mendapatkan estimasi hingga tingkat provinsi. Pada bulan Agustus, selain sampel Sakernas Semester II terdapat sampel tambahan untuk memperoleh estimasi penyajian data hingga tingkat Kabupaten/Kota.

Tujuan pengumpulan data Sakernas adalah menyediakan data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Dan secara khusus, ingin memperoleh informasi jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja serta perkembangan di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Sepanjang tahun 2020 Sakernas dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah sampel sekitar 75.000 rumahtangga (Sakernas Februari) dan 300.000 rumahtangga (Sakernas Agustus). Untuk Sakernas Agustus, jumlah sampel tersebar pada 30.000 blok sensus (BS) baik daerah perkotaan maupun perdesaan. Dari 30.000 BS tersebut terbagi menjadi 7.500 BS Februari dan 22.500 sisanya adalah blok sensus tambahan. Penambahan ini bertujuan untuk mampu mengestimasi data hingga level kabupaten/kota. Sebagai catatan, rumahtangga korps diplomatik, rumahtangga yang tinggal di blok sensus khusus, rumahtangga khusus di bok sensus biasa tidak terpilih sebagai sampel. Di provinsi Papua sendiri, Sakernas dilaksanakan pada 276 blok sensus Februari (panel) untuk level provinsi dan pada pelaksanaan Agustus ditambah 828 blok sensus

menjadi 1.104 blok sensus sampel untuk estimasi level kabupaten/kota. Total rumahtangga sampel untuk pelaksanaan Agustus sebesar 11.040 rumahtangga.

Dari setiap rumahtangga terpilih dikumpulkan keterangan mengenai keadaan umum setiap anggota rumahtangga (ART) meliputi nama, hubungan dengan kepala rumahtangga, jenis kelamin dan umur. Khusus untuk ART yang berusia 5 tahun ke atas ditanyakan keterangan mengenai pendidikan, pekerjaan, pengangguran dan pengalaman kerja.

1.2 SAKERNAS DAN KILM

Dari berbagai macam variabel yang dikumpulkan oleh Sakernas, dapat disusun serangkaian indikator kunci yang merujuk pada publikasi internasional (ILO) yaitu KILM. Namun, yang perlu menjadi catatan adalah, pada saat melakukan interpretasi data hasil Sakernas dengan data ketenagakerjaan dari sumber lain (SP dan SUPAS) perlu memperhatikan beberapa hal, karena data-data tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung. Beberapa faktor perlu dipertimbangkan oleh para pemakai data dalam menginterpretasikan dan menganalisa data ketenagakerjaan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi:

1. Tujuan Survei

Sakernas merupakan survei khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan. Sedangkan SP maupun SUPAS bertujuan untuk mengetahui sifat demografi secara umum. Dengan demikian informasi yang dikumpulkan dalam SP dan Supas lebih banyak dan beragam, antara lain meliputi data pendidikan, migrasi dan ketenagakerjaan. Begitu pula informasi yang dikumpulkan melalui Susenas lebih beragam sifatnya seperti data pengeluaran/konsumsi, kesehatan, perumahan, ketenagakerjaan. Perbedaan tujuan ini menyebabkan kualitas data ketenagakerjaan antar berbagai survey relatif tidak sama.

2. Ukuran Sampel

Ukuran sampel Sakernas dan Supas atau Susenas tidak sama. Perbedaan ini mengakibatkan *sampling error* yang dikandung angka estimasi dari masing-masing sumber data juga berbeda. Semakin kecil ukuran sampel, semakin besar *sampling error*-nya.

3. Faktor Pengali

Faktor pengali yang digunakan dalam publikasi ini, berdasarkan jumlah penduduk hasil SP2020 yang diproyeksi ke bulan Agustus 2020.

4. Kualitas Petugas Lapangan

Sampai dengan semester II (Agustus) 2006, Sakernas dikerjakan oleh pencacah dan pengawas/pemeriksa. Mulai semester I (Februari) 2007 hingga semester II (Agustus) 2010 pencacahan dilakukan secara tim yang terdiri dari 2 pencacah dan 1 koordinator tim. Petugas tersebut pada umumnya adalah pegawai BPS yang ada di kecamatan (Koordinator Statistik

Kecamatan/KSK) dan pegawai BPS kabupaten/kota. Pengalaman mereka sudah banyak sehingga menguasai medan/lapangan dan memahami dengan baik konsep dan definisi terkait kuesioner Sakernas. Sejak tahun 2011, Sakernas tidak dilakukan secara tim lagi dan kembali dicacah secara individu. Setiap pengawas meng-*handle* 2-3 orang pencacah.

5. Perencanaan Kuesioner

Cara menyusun pertanyaan mengenai ketenagakerjaan dalam kuesioner dapat berpengaruh terhadap hasil survei maupun sensus. Ini meliputi bentuk kalimat/pertanyaan yang tertulis, urutan pertanyaan, pemilihan kata-kata yang tepat dalam pertanyaan, dan banyaknya pertanyaan maupun jenis keterangan yang ditanyakan. Dalam Sakernas, telah diusahakan bentuknya ringkas/sederhana, mudah dimengerti serta pertanyaan pokoknya tidak berubah-ubah.

6. Waktu Pelaksanaan/Pencacahan

Waktu pelaksanaan lapangan antara Sakernas, Susenas, Sensus Penduduk, dan Supas berbeda. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan hasil yang diperoleh karena pengaruh musimannya. Mengingat bahwa sejak tahun 2011 Sakernas telah dilakukan secara triwulanan yang selanjutnya menjadi semesteran pada tahun 2015 dengan maksud sebagai *early warning system* di bidang ketenagakerjaan, perlu untuk menyusun rangkaian indikator ketenagakerjaan dengan memanfaatkan data Sakernas tersebut. Di samping itu, penyusunan indikator kunci ketenagakerjaan /KILM pada awalnya dirancang dengan dua tujuan utama yaitu:

- 1) Menyajikan indikator inti pasar tenaga kerja;
- 2) Meningkatkan ketersediaan indikator-indikator ketenagakerjaan untuk memantau perkembangan para tenaga kerja terkini. Indikator-indikator ini merupakan hasil kolaborasi yang melibatkan ILO bersama para ahli dari Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (*Organization for Economic Co-operation and Development-OECD*) dan beberapa perwakilan nasional dari departemen Tenaga kerja dan kantor statistik berbagai negara.

1.3 PERAN KILM DALAM KETENAGAKERJAAN

Identifikasi dan kuantifikasi *inefisiensi* dalam pasar tenaga kerja seperti *underutilization* tenaga kerja dan defisit pekerjaan layak (*decent work*) adalah langkah pertama dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Pandangan luas dunia kerja menuntut pengumpulan data yang lengkap, pengorganisasian dan analisa informasi pasar tenaga kerja. Dalam konteks ini, KILM dapat berfungsi sebagai alat dalam memantau dan menilai banyak hal yang terkait dengan fungsi pasar

tenaga kerja. Berikut ini adalah beberapa contoh bagaimana KILM dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Beberapa peran KILM dalam analisis pasar tenaga kerja antara lain:

1) Mempromosikan Agenda ILO: Pekerjaan yang Layak (*Decent Work*).

Salah satu tujuan agenda ILO adalah mempromosikan pekerjaan yang layak yang memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan produktif dalam kondisi kebebasan, kesetaraan, dan keamanan. Penerapan konsep layak untuk segala bentuk kegiatan ekonomi merupakan suatu multitafsir. Persepsi setiap orang mengenai upah yang layak dapat berbeda secara signifikan.

Selain pekerjaan layak, permasalahan yang muncul dalam dunia ketenagakerjaan adalah kurangnya kesempatan kerja. Ini diidentifikasi menggunakan pendekatan indikator pengangguran (KILM 8 dan KILM 9), tetapi juga bisa menggunakan indikator yang lebih rinci yaitu tingkat ketidakaktifan (KILM 13). Untuk mengetahui kualitas dan jenis pekerjaan dapat dilakukan pendekatan melalui identifikasi kelompok pekerja rentan (*vulnerable employment*), yaitu pekerja berdasarkan status dan sektor (KILM 3 dan KILM 4), jam kerja yang berlebih /*exceeds working hours* (KILM 6), pekerja sektor informal (KILM 7) dan setengah penganggur (KILM 12).

2) Pemantauan pencapaian Tujuan Pembangunan Milineum (MDG's).

Tujuan utama kebijakan nasional serta strategi nasional pembangunan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDG's) adalah meningkatnya jumlah pekerja penuh waktu (*full employment*), pekerja yang produktif dan penyediaan pekerjaan yang layak (*decent work*) untuk semua. Pekerjaan yang layak dan produktif bagi semua merupakan isu sentral untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan. MDG pertama memasukan target baru 1b (disepakati pada tahun 2008) yaitu "mencapai pekerja penuh dan layak bagi semua, termasuk perempuan dan orang-orang muda". Empat indikator yang dipilih untuk memantau kemajuan menuju sasaran 1b dalam MDG's tersedia dalam KILM, yaitu rasio penduduk bekerja terhadap total penduduk (*employment to population ratio / EPR*), proporsi pekerja yang hidup di bawah garis kemiskinan, tingkat pekerja rentan (*vulnerable employment*), dan tingkat pertumbuhan produktifitas tenaga kerja, sesuai dengan indikator KILM 2, KILM 3, KILM 18 dan KILM 20.

3) Memantau kesetaraan gender di pasar tenaga kerja.

Wanita menghadapi tantangan khusus dalam mencapai pekerjaan yang layak. Sebagian besar indikator KILM dipisahkan menurut jenis kelamin yang memungkinkan untuk melakukan perbandingan kesempatan kerja bagi laki-laki dan perempuan.

4) Mengkaji tenaga kerja di era globalisasi.

Globalisasi memiliki potensi manfaat bagi semua, namun hingga saat ini hal tersebut tidak mencakup orang banyak. Oleh karena itu, perlu satu cara untuk menghadapi era globalisasi dengan tetap mendorong penciptaan kesempatan kerja yang layak untuk semua. Salah satu cara untuk melakukannya adalah membuat tenaga kerja menjadi tujuan sentral dari kebijakan ekonomi makro dan sosial. Indikator KILM dapat bermanfaat dalam hal ini dengan memonitor dinamika ketenagakerjaan yang terkait dengan globalisasi. Misalnya, ada penelitian yang menunjukkan bahwa kehilangan pekerjaan/penciptaan serta perubahan upah dan produktifitas dipengaruhi oleh globalisasi. Jika indikator mencerminkan konsekuensi negatif dari globalisasi, maka pembuat kebijakan memiliki pilihan untuk mengubah kebijakan ekonomi makro sehingga dapat meminimalkan biaya penyesuaian (*adjustment cost*) dan mendistribusikan keuntungan dari globalisasi secara lebih adil.

1.4 ANALISIS PASAR TENAGA KERJA MENGGUNAKAN KILM

Saat ini semakin banyak negara yang mempublikasikan angka pengangguran nasional dan data ketenagakerjaan secara agregat. Salah satu keuntungan menggunakan data agregat adalah relatif lebih mudahnya melakukan perbandingan antar wilayah. Contohnya tingkat pengangguran, bisa dibandingkan antar daerah. Untuk melihat kondisi ketenagakerjaan suatu wilayah tidak hanya saja mengamati tingkat pengangguran, tetapi harus melihat unsur-unsur pasar tenaga kerja lainnya. Oleh karena itu, dalam menganalisis pasar tenaga kerja yang perlu dilakukan pertama kali adalah menentukan rincian status tenaga kerja dalam populasi. Pengelompokan penduduk usia kerja menjadi penduduk yang tidak aktif secara ekonomi (di luar tenaga kerja dan bukan angkatan kerja, KILM 13); penduduk yang bekerja (KILM 2) atau tidak bekerja dan mencari pekerjaan (menganggur, KILM 8). Semakin besar penduduk yang masuk dalam kelompok pengangguran atau bukan angkatan kerja, atau keduanya, menunjukkan underutilisasi yang besar dari angkatan kerja yang potensial. Pemerintah yang menghadapi situasi ini semestinya berusaha untuk menganalisis alasan untuk tidak aktif, yang pada gilirannya bisa menentukan pilihan kebijakan yang penting untuk mengubah situasi.

Jika mayoritas penduduk aktif terdiri dari perempuan yang tidak bekerja karena mereka memiliki tanggungjawab rumah tangga, pemerintah mungkin ingin mendorong lingkungan yang memfasilitasi partisipasi ekonomi perempuan melalui misalnya, pembentukan pusat-pusat penitipan anak atau jam kerja fleksibel bagi perempuan atau program untuk menggalakkan pekerjaan pada penyandang cacat dapat membantu menurunkan tingkat ketidakaktifan, jika cacat adalah alasan

umum untuk tidak aktif. Hal yang lebih sulit adalah mengembalikan orang yang telah meninggalkan pasar kerja ke dalam angkatan kerja karena alasan “*putus asa*” / *discourage worker*, yaitu karena merasa tidak ada lagi pekerjaan yang sesuai dan tersedia bagi mereka, dan mereka tidak memiliki kualifikasi yang tepat, atau karena mereka tidak tahu ke mana harus mencari pekerjaan.

Pengangguran juga harus dianalisis menurut jenis kelamin (KILM 8), usia (KILM 9), lamanya menganggur (KILM 10) dan tingkat pendidikan (KILM 11) untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari komposisi pengangguran sehingga bisa menentukan kebijakan pengangguran yang tepat. Karakteristik lain dari pengangguran yang tidak ditampilkan dalam KILM, seperti latar belakang sosial ekonomi, pengalaman kerja, dll, juga penting untuk dianalisa. Jika data tersebut tersedia dapat digunakan untuk menentukan kelompok mana yang mengalami kesulitan tertentu. Paradoksnya, tingkat pengangguran yang rendah mungkin menyamarkan tingkat kemiskinan dalam satu negara (KILM 20), sedangkan tingkat pengangguran tinggi dapat terjadi di negara-negara dengan perkembangan ekonomi yang signifikan dengan insiden kemiskinan rendah. Di negara-negara berkembang dengan skema ketersediaan perlindungan sosial yang baik atau bila terdapat berbagai jaminan sosial atau dukungan yang tersedia, maka pekerja dapat lebih mampu meluangkan waktu untuk mencari pekerjaan yang diinginkan. Oleh karena itu, masalah di banyak negara berkembang bukanlah tingkat pengangguran yang tinggi, melainkan kurangnya kesempatan kerja yang layak dan produktif bagi mereka yang bekerja.

Hal ini membawa kita pada kebutuhan untuk membedah jumlah total lapangan kerja serta untuk menilai kesejahteraan penduduk yang bekerja, di bawah suatu konsep bahwa tidak semua pekerjaan adalah “pekerjaan yang layak”. Jika penduduk yang bekerja terdiri dari sebagian besar bekerja sendiri atau pekerja keluarga (lihat KILM 3), lalu dibandingkan dengan total penduduk yang bekerja (KILM 2), apakah indikator ini akan kehilangan nilainya sebagai ukuran nominatif? Apakah orang-orang ini bekerja? Ya, menurut definisi internasional. Apakah mereka dalam pekerjaan yang layak? Mungkin tidak. Meskipun secara teknis bekerja, beberapa pekerja yang berusaha sendiri atau pekerja keluarga akan bertahan pada pekerjaan mereka saat ini sehingga batas antara bekerja dan menganggur menjadi sangat tipis. Hal ini terlihat ketika terbuka lowongan pekerjaan yang bergaji (buruh/karyawan/pegawai) di kegiatan ekonomi formal, rombongan tenaga kerja akan berlomba-lomba mengisi kesempatan itu.

Identifikasi lebih lanjut harus dilakukan untuk menentukan apakah penduduk bekerja tersebut umumnya miskin (KILM 20), terlibat dalam kegiatan pertanian tradisional (KILM 4), menjual barang-barang di pasar informal tanpa keamanan kerja (KILM 7), jam kerja yang berlebihan (KILM 6) atau ingin memperoleh pekerjaan tambahan (KILM 12).

<https://papua.bps.go.id>

BAB 2

PENJELASAN TEKNIS

Pada subbab ini, akan disampaikan penjelasan teknis terkait dengan konsep dan definisi yang digunakan dalam Sakernas maupun konsep dan definisi yang digunakan dalam KILM.

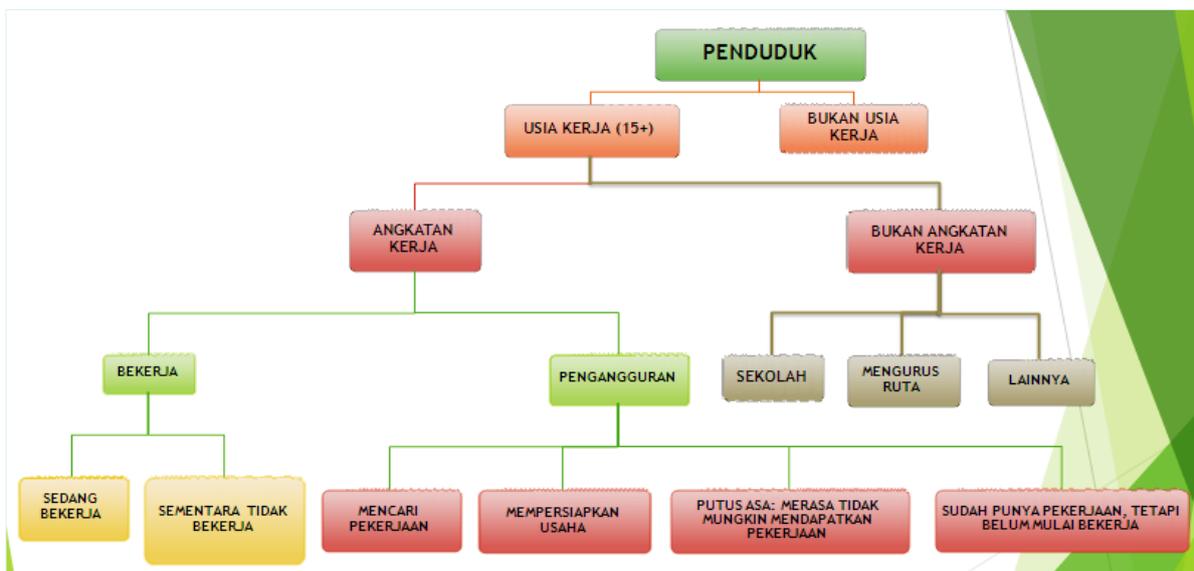
2.1 PENJELASAN UMUM

Sejauh ini sumber data makro mengenai situasi ketenagakerjaan yang secara luas dianggap paling kredibel adalah berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). Suatu survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik secara rutin dalam mengintegrasikan data ketenagakerjaan yang mempunyai peran penting, karena dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode survei.

Konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh Badan Pusat Statistik mengacu pada *The Labour Force Concept* yang disarankan oleh *International Labour Organization* (ILO) seperti yang tercantum dalam buku ***“Surveys or Economically Active Population, Employment, Unemployment and Underemployment” An ILO Manual Concepts and Methods***, ILO 1992. Tujuannya adalah agar data ketenagakerjaan yang dihasilkan dari berbagai survei di Indonesia dapat dibandingkan secara internasional, tanpa mengesampingkan kondisi ketenagakerjaan spesifik Indonesia.

Pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam Sakernas adalah Konsep Dasar Angkatan Kerja (*Standard Labor Force Concepts*) yang dapat dilihat pada bagan ketenagakerjaan di bawah ini.

Gambar 1. Diagram Ketenagakerjaan



The Labor Force Concept, Yang Disarankan oleh International Labour Organization (ILO)

Perlu juga dipahami beberapa konsep umum yang digunakan dalam Sakernas yang juga diadopsi untuk penyusunan KILM, meliputi konsep dan definisi mengenai penduduk, usia kerja, periode referensi dan kriteria satu jam.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi berniat menetap. Berdasarkan bagan ketenagakerjaan, penduduk dibagi menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya. Kelompok tersebut adalah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.

Usia kerja adalah batas umur yang ditetapkan untuk pengelompokan penduduk yang aktif secara ekonomi. Indonesia dalam memberikan batasan umur pada penduduk usia kerja, menggunakan batas bawah usia kerja (*economically active population*) 15 tahun (meskipun dalam survei Sakernas dikumpulkan informasi mulai dari penduduk usia 10 tahun) dan tanpa batas atas usia kerja. Pemberian batas bawah dan batas atas bervariasi dari setiap negara sesuai dengan kebutuhan dan situasi. Sebagai contoh penggunaan batas bawah: Mesir (6 tahun), Brazil (10 tahun), Swedia, USA (16 tahun), Canada (14 dan 15 tahun), India (5 dan 15 Tahun), dan Venezuela (10 dan 15 tahun), sementara penggunaan batas atas penduduk usia kerja contohnya: Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia (74 tahun), Mesir, Malaysia, Mexico (65 tahun), banyak negara termasuk Indonesia tidak menggunakan batas atas.

Angkatan kerja, dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu penduduk yang bekerja dan pengangguran. Sedangkan **bukan angkatan kerja** terdiri dari penduduk yang pada periode rujukan tidak mempunyai /melakukan aktivitas ekonomi. Diantaranya dirinci menjadi tiga kelompok besar kegiatan, yaitu penduduk yang sedang sekolah, penduduk yang sedang mengurus rumah tangga, dan penduduk yang sedang melakukan kegiatan lainnya (olahraga, kursus, piknik, dan kegiatan sosial seperti berorganisasi dan kerja bakti).

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji/pendapatan termasuk semua tunjangan dan bonus bagi pekerja/karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa, bunga atau keuntungan, baik berupa uang atau barang bagi pengusaha. Kegiatan bekerja mencakup baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak aktif bekerja karena sakit, cuti, menunggu panen, mogok kerja, tugas belajar dan sejenisnya.

Pengangguran meliputi mereka yang sedang mencari kerja, atau mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Mencari kerja di sini adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan pada suatu periode rujukan. Mempersiapkan usaha baru adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha baru yang bertujuan memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah jika ada 'tindakan nyata' seperti mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat izin usaha dan sebagainya, telah/sedang dilakukan. Merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa) adalah alasan bagi mereka yang berkali-kali mencari pekerjaan tetapi tidak berhasil mendapatkan pekerjaan sehingga merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Atau mereka yang merasa karena keadaan situasi/kondisi/iklim/ musim menyebabkan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja adalah alasan bagi mereka yang tidak mencari kerja/mempersiapkan usaha karena sudah diterima bekerja, namun pada saat pencacahan belum mulai bekerja.

Periode referensi merupakan periode waktu ditetapkan untuk membatasi keterangan responden. Dalam survei rumah tangga atau individu, periode referensi yang pendek (*a short recent reference period*) akan meminimumkan kesalahan responden dalam mengingat (*recall*) dan juga mengurangi masalah (statistik) yang timbul oleh karena perpindahan penduduk dan perubahan status aktivitas, pekerjaan dan karakteristik penduduk lainnya. Standar internasional untuk periode referensi yang pendek adalah satu hari atau satu minggu. Periode referensi satu minggu (yang lalu) paling banyak diterapkan di negara-negara yang melaksanakan survei angkatan kerja nasional, termasuk Indonesia.

Periode referensi lainnya yang digunakan dalam Sakernas adalah kriteria satu jam. Kriteria ini digunakan dengan pertimbangan untuk mencakup semua jenis pekerjaan yang mungkin ada pada suatu negara, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan dengan waktu singkat (*short time work*), pekerja bebas, *stand-by work* dan pekerjaan yang tidak beraturan lainnya. Kriteria satu jam juga dikaitkan dengan definisi bekerja dan penganggur yang digunakan, di mana penganggur adalah situasi dari ketiadaan pekerjaan secara total (*lack of work*) dari jumlah jam kerja dinaikkan maka akan mengubah definisi penganggur yaitu bukan lagi ketiadaan pekerjaan secara total.

Di samping itu, juga untuk memastikan bahwa pada suatu tingkat agregasi tertentu input tenaga kerja total berkaitan langsung dengan produksi total. Hal ini diperlukan terutama ketika dilakukan analisis gabungan antara statistik ketenagakerjaan dan statistik produksi.

ILO merekomendasikan untuk memperhatikan *the one hour criterion*, yaitu digunakannya konsep/definisi satu jam dalam periode referensi tertentu untuk menentukan seseorang dikategorikan sebagai bekerja (*employed*). BPS menggunakan konsep/definisi "bekerja paling sedikit 1 jam dalam seminggu yang lalu" untuk mengkategorikan seseorang (*currently economically active population*) sebagai bekerja, tanpa melihat lapangan usaha, jabatan, maupun status pekerjaannya.

2.2 INDIKATOR KUNCI PASAR TENAGA KERJA

ILO meluncurkan Indikator Pasar Tenaga Kerja / KILM (*Key Indicator of Labor Market*) pada tahun 1999 untuk melengkapi program reguler pengumpulan data dan untuk meningkatkan penyebaran data pada elemen kunci dari pasar tenaga kerja dunia.

Terdapat 20 (dua puluh) indikator yang disusun oleh ILO yang dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) kelompok, yaitu:

- 1) Partisipasi di dunia kerja, yang terdiri dari KILM 1, yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja;
- 2) Indikator pekerja, terdiri dari KILM 2 (rasio pekerja terhadap jumlah penduduk), KILM 3 (penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama), KILM 4 (lapangan usaha tenaga kerja), KILM 5 (pekerja paruh waktu), KILM 6 (jam kerja) dan KILM 7 (tenaga kerja di ekonomi formal);
- 3) Indikator pengangguran, *underemployment* dan ketidak-aktifan, yang terdiri dari KILM 8 (pengangguran), KILM 9 (pengangguran pada kelompok muda), KILM 10 (pengangguran jangka panjang), KILM 11 (pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan), KILM 12 (*underemployment*), dan KILM 13 (tingkat ketidakaktifan);
- 4) Indikator pendidikan dan melek huruf, yang terdiri dari KILM 14 (pencapaian pendidikan dan melek huruf);
- 5) Indikator upah dan biaya tenaga kerja, yang terdiri dari KILM 15 (indeks upah sektor manufaktur), KILM 16 (indikator upah dan pendapatan berdasarkan jabatan) dan KILM 17 (upah per jam);
- 6) Produktifitas tenaga kerja yang terdiri dari KILM 18 (produktifitas tenaga kerja);
- 7) Indikator elastisitas tenaga kerja yang termuat dalam KILM 19 (elastisitas tenaga kerja); dan
- 8) Indikator kemiskinan, pekerja miskin dan distribusi pendapatan yang tertuang dalam KILM 20 (indikator kemiskinan, pekerja miskin dan distribusi pendapatan).

2.2.1. PARTISIPASI DI DUNIA KERJA

KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi. Secara umum, kegunaan indikator ini adalah untuk mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah dan menunjukkan besaran relatif dan pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk produksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Table publikasi standar yang dikeluarkan ILO (*KILM 6th ed*) menyajikan estimasi tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur, dengan standar sebagai berikut: 15+, 15-24, 15-64, 25-54, 25-34, 35-54, 55-64, dan 65 tahun ke atas. Penggunaan kelompok umur ini digunakan di lebih dari 190 negara selama tahun 1980 sampai saat ini.

Beberapa konsep yang berkaitan dengan indikator ini adalah sebagai berikut:

Angkatan Kerja (AK)

Konsep angkatan kerja merujuk pada kegiatan utama yang dilakukan oleh penduduk usia kerja selama periode tertentu. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penganggur.

Dalam angkatan kerja terdapat penduduk yang kegiatannya adalah bekerja. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 (satu) jam secara tidak terputus selama seminggu yang lalu. Kegiatan bekerja ini mencakup, baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak bekerja, misalnya karena cuti, sakit, dan sejenisnya. Konsep bekerja satu jam selama seminggu yang lalu juga digunakan oleh banyak negara antara lain Pakistan, Filipina, Bulgaria, Hungaria, Polandia, Romania, Federasi Rusia, dan lainnya.

Bukan Angkatan Kerja (BAK)

Penduduk usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja mencakup penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.

2.2.2. INDIKATOR PEKERJA

KILM 2. Rasio Pekerja Terhadap Jumlah Penduduk/ Employment to Population Ratio (EPR)

Rasio pekerja terhadap jumlah penduduk (EPR) didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia kerja suatu negara yang berstatus bekerja terhadap penduduk usia kerja. Rasio yang tinggi berarti

sebagian besar penduduk suatu negara adalah bekerja, sementara rasio rendah berarti bahwa sebagian besar penduduk tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pasar, karena mereka menganggur atau (lebih mungkin) tidak termasuk dalam angkatan kerja yang sering disebut sebagai Bukan Angkatan Kerja (BAK).

Rasio ini memberikan informasi tentang kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja, karena di banyak negara indikator ini menghasilkan analisis yang lebih mendalam dibandingkan dengan tingkat pengangguran. Meskipun secara keseluruhan rasio tinggi biasanya dianggap sebagai positif, indikator ini saja tidak cukup untuk menilai tingkat pekerjaan yang layak atau tingkat defisit pekerjaan yang layak. Indikator tambahan diperlukan untuk menilai isu-isu seperti upah/gaji, jam kerja, lapangan kerja sektor informal, setengah pengangguran dan kondisi kerja. Bahkan, nilai rasio ini bisa tinggi untuk alasan yang tidak selalu positif misalnya pilihan pendidikan yang terbatas sehingga kaum muda mengambil pekerjaan yang tersedia daripada tinggal di sekolah untuk membangun modal manusia mereka (memilih bekerja demi melanjutkan sekolah/membiayai sekolah). Untuk alasan ini, sangat disarankan bahwa indikator ini harus ditinjau ulang secara kolektif dalam setiap evaluasi kebijakan tenaga kerja di suatu negara/wilayah.

KILM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Kategorisasi menurut status pekerjaan dapat membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu negara. Selama bertahun-tahun, dan dengan kemajuan pembangunan, suatu negara biasanya akan mengharapkan untuk dapat melihat pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan pada jumlah pekerja yang digaji (buruh/karyawan/pegawai) dan penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya berkontribusi/bekerja di sektor pertanian.

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Informasi mengenai status dalam pekerjaan yang dikumpulkan dalam Sakernas adalah:

1. Berusaha sendiri.
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar.
3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar.
4. Buruh/Karyawan/Pegawai.
5. Pekerja bebas di pertanian.
6. Pekerja bebas di nonpertanian.
7. Pekerja keluarga/tak dibayar.

Dalam publikasi ini, pengelompokan status dalam pekerjaan utama adalah sebagai berikut:

Penduduk yang bekerja dengan upah/gaji adalah penduduk bekerja dengan status pekerjaan buruh/karyawan/pegawai;

Penduduk yang berusaha, terdiri dari:

- a. Pengusaha, yaitu penduduk bekerja dengan status pekerjaan dibantu buruh tetap/buruh dibayar;
- b. Berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar;
- c. Pekerja bebas yang terdiri dari pekerja bebas di pertanian dan non-pertanian;
- d. Pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

KILM 4. Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor

Informasi sektoral biasanya berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam buku teks pembangunan ekonomi, tenaga kerja berpindah dari pertanian dan aktifitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa-jasa; dalam prosesnya, pekerja berpindah dari desa ke kota.

Klasifikasi baku yang digunakan dalam penggolongan lapangan pekerjaan/ lapangan usaha adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Untuk kepentingan penyajian/publikasi, digunakan kategori/sektor sebagai berikut:

1. Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan;
2. Pertambangan dan penggalian;
3. Industri pengolahan;
4. Listrik, gas dan air;
5. Bangunan;
6. Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel;
7. Angkutan, pergudangan dan komunikasi;
8. Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan;
9. Jasa kemasyarakatan.

Untuk kepentingan analisis, sektor dalam perekonomian dibagi menjadi 3 (tiga) sektor yaitu *A(griculture)/Pertanian*, *M(anufacture)/Manufaktur* dan *S(ervices)/Jasa-jasa*, berdasarkan pada definisi sektor *International Standard Industrial Classification (ISIC) System (Revisi 2 dan Revisi 3)*.

KILM 5. Pekerja Paruh Waktu

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja serta pada tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Mengukur tingkat dan tren di jam-jam bekerja di masyarakat, untuk berbagai kelompok pekerja dan untuk pekerja secara

individu menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi. Indikator pekerja paruh waktu berfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari *full time*, yang merupakan proporsi dari total pekerja. Karena tidak ada definisi yang disepakati secara internasional untuk jumlah minimum jam dalam seminggu yang merupakan pekerjaan penuh-waktu (*full time*), garis pemisah tersebut ditentukan, baik atas dasar negara-oleh-negara atau melalui penggunaan estimasi khusus. Tetapi, jika tidak ada kesepakatan, biasanya digunakan batas 35 jam seminggu sebagai jam kerja normal. Beberapa negara yang menggunakan batas 35 jam adalah Republik Korea, Amerika dan El Salvador. Untuk kasus Indonesia, batas yang digunakan adalah kurang dari 35 jam seminggu dan mencari pekerjaan.

KILM 7. Tenaga Kerja Sektor Informal

Pekerja di sektor informal terkait perkiraan jumlah orang yang bekerja di sektor informal dibandingkan dengan jumlah orang bekerja. Dalam hal ukuran dan pertumbuhan, sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. Konferensi Internasional Statistik Perburuhan (ICLS) ke-15 mendefinisikan sektor informal sebagai unit produksi dalam usaha rumahtangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Mereka yang bekerja di sektor informal terdiri semua orang yang, selama periode acuan tertentu, yang bekerja di setidaknya satu unit produksi yang memenuhi konsep sektor informal, terlepas dari status mereka dalam pekerjaan dan apakah itu pekerjaan utama atau pekerjaan sekunder. Resolusi ICLS memperbolehkan beberapa variasi konsep nasional. Akibatnya, informasi untuk indikator sering didasarkan pada definisi nasional dan pengukuran ekonomi informal.

BPS melakukan pendekatan khusus dalam menentukan pekerja sektor formal/ informal yaitu berdasarkan status dalam pekerjaan utama dari jenis pekerjaan/jabatan.

2.2.3. INDIKATOR PENGANGGURAN, UNDER-EMPLOYMENT DAN KETIDAKAKTIFAN

KILM 8. Pengangguran

Tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Ini tidak boleh disalahartikan sebagai kesulitan ekonomi, meskipun korelasi antara tingkat pengangguran dan kemiskinan sering ada dan cenderung memiliki korelasi negatif. Definisi baku untuk penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, dan bersedia untuk bekerja. Secara spesifik, penganggur terbuka dalam Sakernas, terdiri atas:

1. Mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan;
2. Mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha;
3. Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan
4. Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran oleh banyak negara digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan. Jika bekerja diambil sebagai situasi yang diinginkan bagi orang-orang dalam populasi yang secara ekonomi aktif (angkatan kerja), maka pengangguran menjadi situasi yang tidak diinginkan. Namun, beberapa pengangguran jangka pendek dapat diinginkan dan diperlukan untuk memastikan penyesuaian (*adjustment*) terhadap fluktuasi ekonomi. Tingkat pengangguran pada kelompok tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan pendidikan berguna dalam mengidentifikasi kelompok pekerja dan sektor-sektor yang paling rentan terhadap pengangguran.

Sementara tingkat pengangguran tenaga kerja, dapat dianggap sebagai indikator yang paling informatif mencerminkan indikasi pasar umum dan kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan, tidak harus ditafsirkan sebagai ukuran kesulitan ekonomi atau kesejahteraan. Bila didasarkan pada standar internasional yang direkomendasikan, tingkat pengangguran hanya memberikan gambaran proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tapi bersedia dan secara aktif mencari pekerjaan. Angka ini menggambarkan tentang sumber daya ekonomi pekerja menganggur atau anggota keluarga mereka. Penggunaannya harus dibatasi sebagai ukuran pemanfaatan tenaga kerja serta indikasi kegagalan untuk mencari pekerjaan. Tindakan-tindakan lain, termasuk indikator pendapatan yang terkait, akan diperlukan untuk mengevaluasi kesulitan ekonomi.

Tingkat pengangguran secara matematis didefinisikan sebagai hasil bagi yang dihasilkan dari membagi jumlah pengangguran (untuk negara atau kelompok pekerja tertentu) dengan jumlah angkatan kerja. Harus ditekankan bahwa denominator/ faktor pembagi yang berfungsi sebagai dasar statistik ini adalah tenaga kerja atau penduduk yang aktif secara ekonomi, bukan jumlah penduduk. Perbedaan ini tidak selalu dipahami oleh publik. Memang istilah “angkatan kerja” dan “bekerja” kadang-kadang keliru digunakan secara bergantian. Misalnya, tingkat pengangguran adalah 6 persen, maka dapat dikatakan bahwa terdapat 6 persen dari penduduk yang aktif secara ekonomi (angkatan kerja) saat ini sedang tidak bekerja dan mencari pekerjaan atau bersedia bekerja.

KILM 9. Pengangguran Pada Kelompok Pemuda

Tingkat pengangguran penduduk umur muda memberikan gambaran kepada kita mengenai proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Pemuda yang menganggur merupakan salah satu masalah yang memerlukan penanganan kebijakan khusus yang penting bagi banyak negara, terlepas dari tahap pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah “pemuda” mencakup orang yang berusia 16 sampai 30 tahun, sedangkan “orang dewasa” didefinisikan sebagai orang yang berusia 31 tahun ke atas.

KILM 10. Pengangguran Jangka Panjang

Pengangguran jangka panjang merupakan stok tenaga kerja yang tidak dapat dimanfaatkan, merupakan bagian dari angkatan kerja, tetapi tidak memiliki pekerjaan (menganggur) dalam jangka waktu tertentu. Sayangnya, Sakernas tidak mengumpulkan informasi mengenai berapa lama seseorang menganggur. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

KILM 11. Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Indikator ini melihat hubungan antara pencapaian pendidikan pekerja dan pengangguran yang memberikan gambaran mengenai perubahan dalam permintaan tenaga kerja. Informasi mengenai tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan memiliki implikasi penting bagi penduduk bekerja dan kebijakan pendidikan. Jika dikonfirmasi bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang rendah berada pada resiko yang lebih tinggi menjadi pengangguran, reaksi politik yang mungkin adalah meningkatkan tingkat pendidikan mereka atau menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan keterampilan yang lebih rendah (*low skilled job*) di dalam negeri. Di sisi lain, komposisi pengangguran yang lebih tinggi di kalangan orang-orang dengan pendidikan tinggi bisa menunjukkan kurangnya pekerjaan teknis yang profesional dan tingkat tinggi. Tabel yang biasanya disajikan menunjukkan distribusi persentase dari total pengangguran suatu negara sesuai dengan lima tingkat sekolah, tingkat pra-dasar, kurang dari satu tahun, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tersier (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat sekolah). Sebagai catatan, angka yang ditampilkan bisa berupa distribusi dan bisa berupa *rate*.

KILM 12. Setengah Penganggur (*Underemployment*)

Mereka yang dikategorikan dalam setengah penganggur adalah mereka yang jumlah jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu yang lalu), dengan kondisi: Mereka yang dengan sukarela mencari pekerjaan tambahan yang meliputi: Mereka yang menginginkan pekerjaan lain untuk menambah jam kerjanya dari pekerjaannya yang sekarang; Mereka yang menginginkan mendapat ganti dari pekerjaannya yang sekarang dengan

pekerjaan lain yang mempunyai jam kerja lebih banyak; Mereka yang bersedia menerima pekerjaan tambahan.

KILM 13. Tingkat Ketidakaktifan

Tingkat ketidakaktifan adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja suatu negara yang tidak terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan. Tingkat ketidakaktifan yang merupakan proporsi penduduk usia kerja yang tidak termasuk dalam angkatan kerja, jika dijumlahkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (lihat KILM 1) maka hasilnya adalah 100 persen, dengan perkataan lain tingkat ketidakaktifan sama dengan 1 dikurang TPAK (1-TPAK).

Dalam beberapa situasi, tingkat ketidakaktifan tinggi untuk kelompok populasi tertentu tidak harus selalu dilihat sebagai “buruk”, misalnya, tingkat ketidakaktifan yang relatif tinggi untuk wanita usia 25-34 tahun mungkin karena mereka meninggalkan pasar kerja untuk mengurus keluarga dan melaksanakan tanggung jawab seperti melahirkan anak dan pengasuhan anak. Dengan menggunakan data dalam KILM 13, pengguna dapat melihat sejauh mana ibu berkaitan dengan pola tenaga kerja perempuan. Telah lama diakui bahwa aspek-aspek struktur rumah tangga terkait dengan aktivitas pasar tenaga kerja. Misalnya, perempuan kepala rumah tangga cenderung memiliki tingkat aktivitas yang relatif tinggi. Pada pasangan yang menikah, suami biasanya memiliki tingkat ketidakaktifan yang rendah, terutama jika ada anak-anak dalam keluarga. Tingkat ketidakaktifan yang rendah pada wanita bisa berkorelasi dengan tingginya tingkat ketidakaktifan untuk laki-laki, yaitu suami, jika laki-laki sedang menyelesaikan pendidikan atau secara fisik tidak mampu bekerja, sehingga membuat istri sebagai pencari nafkah utama.

2.2.4. INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf

Informasi tentang tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu penting untuk menilai kemampuan suatu negara untuk bersaing dengan sukses di pasar dunia dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat. Tabel KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja dengan lima tingkat pendidikan yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat pra-dasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat pendidikan yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat tinggi).

Kategori yang digunakan dalam indikator ini secara konseptual berdasarkan tingkat Standar Internasional Klasifikasi Pendidikan (ISCED-97). Pengelompokan tingkat pendidikan berdasarkan ISCED-97 adalah sebagai berikut:

- Tidak pernah bersekolah adalah mereka yang tidak/belum pernah bersekolah sama sekali;
- Sekolah dasar, yaitu mereka yang memiliki pendidikan tidak/belum tamat SD, SD/ Ibtidaiyah, Paket A, SMP/Tsanawiyah, SMP Kejuruan dan Paket B;
- Sekolah menengah, yaitu mereka dengan pendidikan SMA/Aliyah, SMK, Paket C; dan
- Sekolah tinggi, yaitu mereka yang memiliki ijazah Diploma I/II, Diploma III, Diploma IV/Sarjana dan S2/S3.

2.2.5. INDIKATOR UPAH DAN BIAYA TENAGA KERJA

KILM 15. Indeks Upah Sektor Manufaktur

Sektor manufaktur yang dikenal sebagai sektor formal dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan pekerja melalui indeks upah pada sektor ini. Tetapi, terdapat survei khusus (Survey Upah dan Survey Struktur Upah) yang bukan merupakan bagian dari Sakernas yang dilakukan untuk mengumpulkan data terkait dengan indikator ini. Oleh karena itu indikator tersebut tidak dapat disajikan pada publikasi KILM ini.

KILM 16. Indikator Upah dan Pendapatan

Berdasarkan Jabatan Salah satu keterbatasan variabel pada Sakernas adalah hanya menanyakan upah/pendapatan pada status pekerjaan tertentu. Akibatnya, tidak semua penduduk bekerja mempunyai informasi pendapatan/upah. Estimasi pendapatan dapat saja dilakukan dengan menggunakan teknik statistik (*Two Step Heckmen*). Oleh karena itu, indikator ini juga tidak dapat disajikan pada publikasi ini.

KILM 17. Upah Per Jam

Seperti KILM 15 dan 16 mengenai informasi upah, Sakernas tidak memiliki informasi upah per jam. Tidak adanya pertanyaan mengenai informasi upah per jam dikarenakan kebanyakan di Indonesia, pekerja tidak dibayar berdasarkan jam kerja, tetapi hari kerja. Hanya sedikit sekali lapangan pekerjaan yang membayar pekerja berdasarkan hitungan jam. Selain itu, dalam Sakernas, yang ditanyakan adalah pendapatan sebulan terakhir, sementara untuk jam kerja, ditanyakan jumlah jam kerja seminggu terakhir. Estimasi upah kerja per jam akan sangat beresiko menimbulkan bias statistik. Oleh karena itu, indikator ini tidak dipublikasikan pada publikasi KILM ini.

2.2.6. PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA

KILM 18. Produktifitas Tenaga Kerja

Tingkat produktifitas tenaga kerja merupakan ukuran penting untuk melihat sejauh mana faktor produksi L (Labor/Tenaga Kerja) berperan dalam proses produksi. Tingkat produktifitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai output yang dihasilkan oleh satu unit tenaga kerja. Semakin tinggi output yang dihasilkan, maka semakin produktif tenaga kerja tersebut, demikian sebaliknya.

Indikator ini juga penting untuk melihat sektor mana saja yang memiliki tenaga kerja dengan produktifitas tinggi, dan sektor mana yang tidak. Identifikasi ini memberikan gambaran sektor yang memerlukan tenaga kerja yang banyak (*labour intencive*) dan sektor padat modal (*capital intencive*). Tetapi, keterbatasan variabel yang dikumpulkan pada Sakernas mengakibatkan tidak bisanya indikator ini disajikan pada publikasi kali ini.

2.2.7. INDIKATOR ELASTISITAS TENAGA KERJA

KILM 19. Elastisitas Tenaga Kerja

Tingkat elastisitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai banyaknya tenaga kerja yang terserap pada proses produksi untuk menghasilkan nilai tambah tertentu. Dengan kata lain, elastisitas tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja terserap setiap peningkatan satu persen pertumbuhan ekonomi. Untuk melakukan analisis ini, diperlukan data nilai tambah (PDB/PDRB). Analisis ini merupakan analisis lintas sektor, sehingga tidak bisa ditampilkan dalam publikasi ini.

2.2.8. INDIKATOR KEMISKINAN, PEKERJA MISKIN DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

KILM 20. Indikator Kemiskinan, Pekerja Miskin dan Distribusi Pendapatan

Sebagaimana indikator elastisitas tenaga kerja, indikator kemiskinan, pekerja miskin dan distribusi pendapatan juga memerlukan beberapa variabel tambahan yang tidak ditanyakan pada Sakernas. Selain itu, data lintas sektor juga penting untuk melengkapi analisis ini. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas

<https://papua.bps.go.id>

BAB 3

INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA

3.1 PARTISIPASI DI DUNIA KERJA (KILM 1)

KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. Informasi angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan gambaran distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK dihitung dengan menyatakan jumlah orang dalam angkatan kerja sebagai persentase dari penduduk usia kerja. Angkatan kerja adalah jumlah orang yang bekerja ditambah jumlah pengangguran. Penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang ditentukan untuk mengukur karakteristik ekonomi.

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada Agustus 2020 yang masuk dalam angkatan kerja ada sebanyak 1.767.403 jiwa, menurun jika dibandingkan Agustus 2019. Pada periode yang sama, TPAK menurun dari 76,93 persen pada Agustus 2019 menjadi 72,16 persen pada Agustus 2020. Penurunan TPAK terjadi karena pandemi COVID-19 yang secara signifikan mengurangi lapangan pekerjaan.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin dan klasifikasi daerah, TPAK laki-laki menurun dari 85,99 persen pada Agustus 2019 menjadi 79,84 persen pada Agustus 2020. Hal yang sama terjadi dengan TPAK perempuan yang menurun dari 66,72 persen pada Agustus 2019 menjadi 63,47 persen pada Agustus 2020. Dilihat dari klasifikasi wilayahnya, baik di perkotaan maupun perdesaan, TPAK Agustus 2020 juga mengalami penurunan dibanding Agustus 2019. Di wilayah perkotaan, TPAK menurun sekitar 0,13 persen. Sementara ini, di wilayah perdesaan, TPAK mengalami penurunan lebih banyak yaitu sekitar 6,63 persen.

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Sakernas Tahun 2018 - 2020

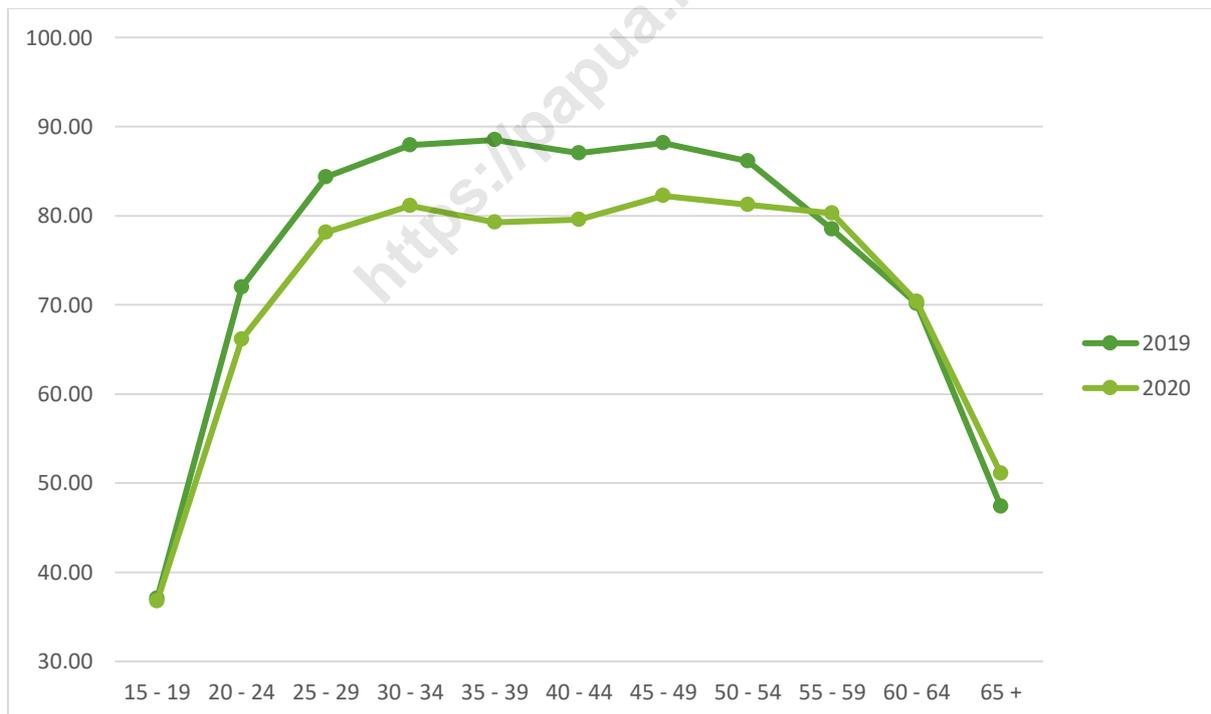
Kategori	2018	2019	2020
Total	79,02	76,93	72,16
Laki-Laki	86,44	85,99	79,84
Perempuan	70,53	66,72	63,47
Perkotaan	64,81	64,40	64,27
Perdesaan	84,91	82,15	75,52
(15-64)	80,26	78,09	73,00
Laki-Laki	87,72	87,46	80,55
Perempuan	71,77	67,62	64,49
Perkotaan	66,91	66,32	65,40
Perdesaan	85,64	82,86	76,14
(15-24)	55,53	54,34	51,60
Laki-Laki	60,36	58,94	55,34
Perempuan	50,10	49,38	47,47
Perkotaan	37,80	38,82	34,66
Perdesaan	63,36	60,84	58,87
(25-54)	86,96	84,75	77,99
Laki-Laki	95,15	94,95	86,61
Perempuan	90,82	86,20	80,50
Perkotaan	78,89	77,39	77,23
Perdesaan	93,22	90,63	81,20
(25-34)	88,68	86,10	79,59
Laki-Laki	97,10	96,79	89,01
Perempuan	79,48	74,66	69,56
Perkotaan	78,32	77,03	75,18
Perdesaan	92,79	89,63	81,30
(35-54)	79,71	76,71	70,83
Laki-Laki	98,11	98,38	88,82
Perempuan	80,31	75,26	70,79
Perkotaan	79,29	77,63	78,55
Perdesaan	93,49	91,26	81,13
(55-64)	75,08	74,98	75,74
Laki-Laki	83,03	85,30	83,26
Perempuan	64,32	61,62	65,93
Perkotaan	62,35	63,41	64,64
Perdesaan	82,30	81,53	82,15
65 Tahun Ke Atas	43,19	47,37	51,09
Laki-Laki	51,98	51,82	62,76
Perempuan	31,47	41,32	36,66
Perkotaan	27,49	32,94	46,11
Perdesaan	56,81	59,02	55,29

Sumber: Sakernas 2018-2020

Dapat dilihat pada Tabel 1, bahwa hampir di semua pengelompokan di rentang umur produktif (15-64 tahun), TPAK mengalami penurunan. Penurunan terbesar dapat terlihat pada rentang umur 25-54 tahun, dari yang semula 84,75 persen pada Agustus 2019 menjadi 77,99 persen pada tahun ini. Sementara itu, peningkatan TPAK terjadi pada kelompok usia 65 tahun ke atas yang naik sebesar 3,72 persen.

Gambar 2 menunjukkan pola TPAK menurut kelompok umur. Dapat dilihat pada grafik bahwa pola yang ditunjukkan pada Agustus 2020 hampir serupa dengan tahun sebelumnya. TPAK masih sangat rendah pada kelompok umur 15-19 tahun, di mana sebagian besar penduduk kemungkinan masih menjalani masa pendidikan. TPAK mulai naik secara signifikan pada kelompok umur 20-24 tahun. Ini mengindikasikan bahwa sudah banyak kaum muda yang masuk ke dalam pasar kerja. Kemudian, pada umur 30 sampai 49 tahun, TPAK stabil pada persentase yang tinggi. Sedikit berbeda dengan tahun 2019 di mana TPAK mencapai puncaknya pada kelompok umur 35-39 tahun, pada tahun 2020 persentase tertinggi terjadi pada kelompok umur 45-49 tahun. Tingkat partisipasi kembali menurun signifikan pada kelompok umur 60 tahun ke atas.

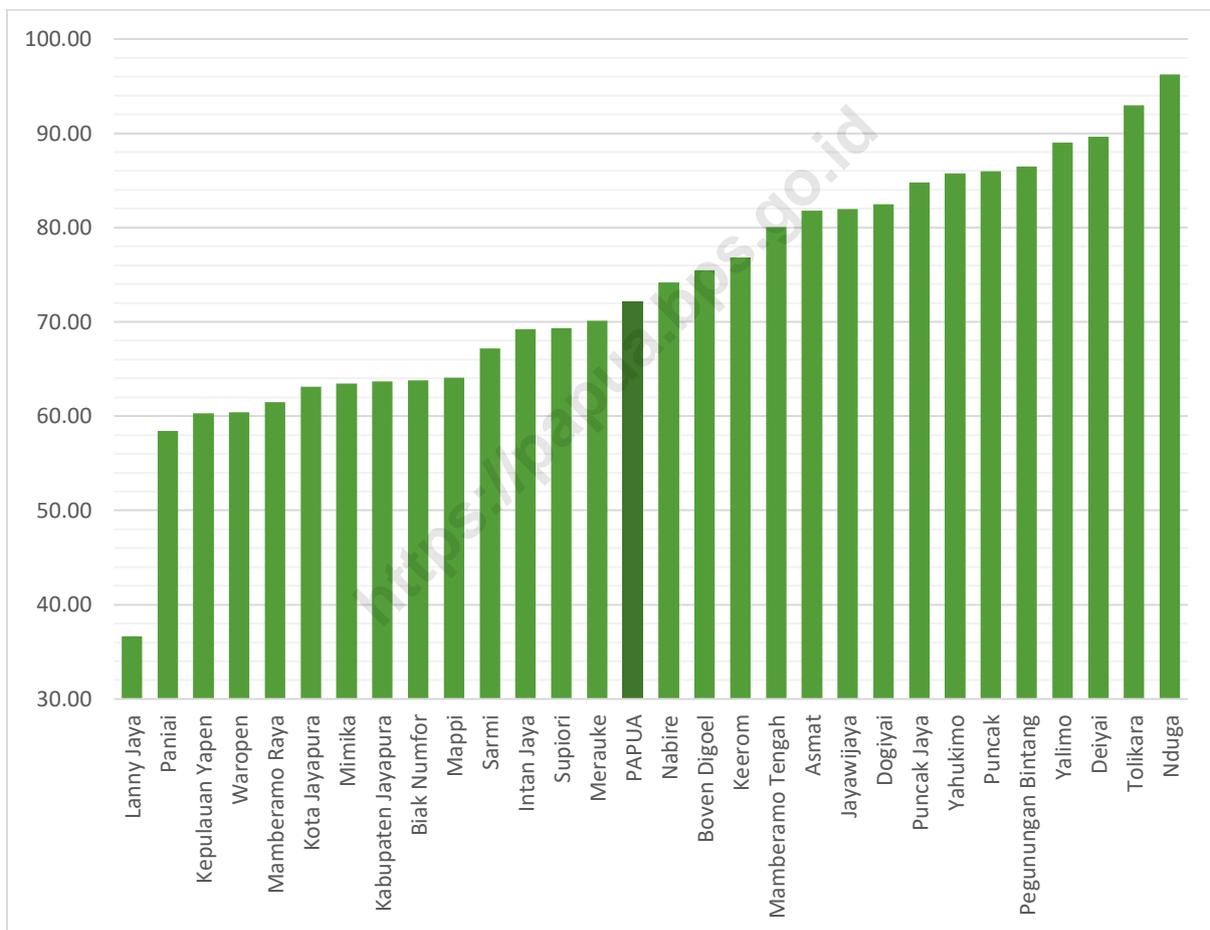
Gambar 2. Pola TPAK Menurut Kelompok Umur, 2019-2020



Sumber: Sakernas 2019-2020, data diolah

Gambar 3 menunjukkan pergerakan TPAK yang terjadi di kabupaten/kota di Provinsi Papua pada Agustus 2020. Batang yang berwarna lebih gelap adalah TPAK Provinsi Papua. Untuk lebih memudahkan pengamatan, tingkat partisipasi diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Setelah diurutkan, tampak bahwa pada kondisi Agustus 2020 TPAK tertinggi terjadi di Kabupaten Nduga. Sementara itu, TPAK terendah terjadi di Kabupaten Lanny Jaya. Disparitas yang terjadi antara TPAK tertinggi terhadap terendah sekitar 59,60 persen. Selanjutnya, dengan mengacu pada TPAK Provinsi Papua sebagai rata-rata, maka terdapat 14 kabupaten/kota yang memiliki TPAK berada dibawah rata-rata Provinsi Papua. Sebaliknya, 15 kabupaten lainnya memiliki TPAK lebih tinggi.

Gambar 3. TPAK Menurut Kabupaten/Kota, 2020



Sumber: Sakernas 2020, data diolah

3.2. INDIKATOR PEKERJA

KILIM 2. Rasio Pekerja Terhadap Jumlah Penduduk/ Employment to Population Ratio (EPR)

Rasio pekerja terhadap jumlah penduduk (EPR) didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia kerja suatu negara yang berstatus bekerja terhadap penduduk usia kerja. Rasio yang tinggi berarti sebagian besar penduduk suatu negara adalah bekerja, sementara rasio rendah berarti bahwa sebagian besar penduduk tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pasar, karena mereka menganggur atau (lebih mungkin) tidak termasuk dalam angkatan kerja yang sering disebut sebagai Bukan Angkatan Kerja (BAK).

Rasio ini memberikan informasi tentang kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja, karena di banyak negara indikator ini menghasilkan analisis yang lebih mendalam dibandingkan dengan tingkat pengangguran. Meskipun secara keseluruhan rasio tinggi biasanya dianggap sebagai positif, indikator ini saja tidak cukup untuk menilai tingkat pekerjaan yang layak atau tingkat defisit pekerjaan yang layak. Indikator tambahan diperlukan untuk menilai isu-isu seperti upah/gaji, jam kerja, lapangan kerja sektor informal, setengah pengangguran dan kondisi kerja. Bahkan, nilai rasio ini bisa tinggi untuk alasan yang tidak selalu positif misalnya pilihan pendidikan yang terbatas sehingga kaum muda mengambil pekerjaan yang tersedia daripada tinggal di sekolah untuk membangun modal manusia mereka (memilih bekerja demi melanjutkan sekolah/ membiayai sekolah). Untuk alasan ini, sangat disarankan bahwa indikator ini harus ditinjau ulang secara kolektif dalam setiap evaluasi kebijakan tenaga kerja di suatu wilayah.

Pada periode Agustus 2019 ke Agustus 2020, nilai EPR Provinsi Papua menurun sekitar 5,16 persen dari 74,23 menjadi 69,07 pada tahun 2020. Hal ini menjelaskan bahwa telah terjadi penurunan persentase penduduk yang bekerja pada periode Agustus 2019 hingga Agustus 2020 dengan cukup signifikan. EPR Papua sebesar 69,07 persen pada tahun 2020 mempunyai arti bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas, terdapat sekitar 69 orang yang bekerja pada Agustus 2020. Apabila dilihat menurut jenis kelamin, pada Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas) terjadi penurunan EPR baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan. Penurunan EPR pada laki-laki (7,02 persen) lebih besar dibanding pada perempuan (3,09 persen). Sementara itu, jika dipisahkan menurut wilayah tempat tinggal, penurunan terjadi baik pada wilayah perkotaan maupun perdesaan. Penurunan EPR di perdesaan yang (7,11 persen) lebih besar daripada perkotaan (0,25 persen).

Tabel 2. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kelompok Umur, 2018-2020

Kelompok Umur	2018	2019	2020
Usia 15 tahun ke atas	2.349.469	2.414.281	2.449.145
Laki-laki	1.253.811	1.279.473	1.300.741
Perempuan	1.095.658	1.134.808	1.148.404
Perkotaan	689.087	709.851	730.420
Perdesaan	1.660.382	1.704.430	1.718.725
Umur muda (15-24)	521.842	548.728	549.850
Laki-laki	276.286	284.358	288.020
Perempuan	245.556	264.370	261.830
Perkotaan	159.909	162.056	165.216
Perdesaan	361.933	386.672	384.634
Umur dewasa (25+)	1.827.627	1.865.553	1.899.295
Laki-laki	977.525	995.115	1.012.721
Perempuan	850.102	870.438	886.574
Perkotaan	529.178	547.795	565.204
Perdesaan	1.298.449	1.317.758	1.334.091
Umur 15 tahun ke atas yang bekerja	1.800.727	1.792.157	1.691.745
Laki-laki	1.048.998	1.062.372	988.727
Perempuan	751.729	729.785	703.018
Perkotaan	411.265	417.099	427.370
Perdesaan	1.389.462	1.375.058	1.264.375
Umur muda (15-24) yang bekerja	260.446	268.739	256.519
Laki-laki	147.920	148.995	142.398
Perempuan	112.526	119.744	114.121
Perkotaan	43.403	46.800	43.298
Perdesaan	217.043	221.939	213.221
Umur dewasa (25+) yang bekerja	1.540.281	1.523.418	1.435.226
Laki-laki	901.078	913.377	846.329
Perempuan	639.203	610.041	588.897
Perkotaan	367.862	370.299	384.072
Perdesaan	1.172.419	1.153.119	1.051.154

Sumber: Sakernas 2018-2020, data diolah

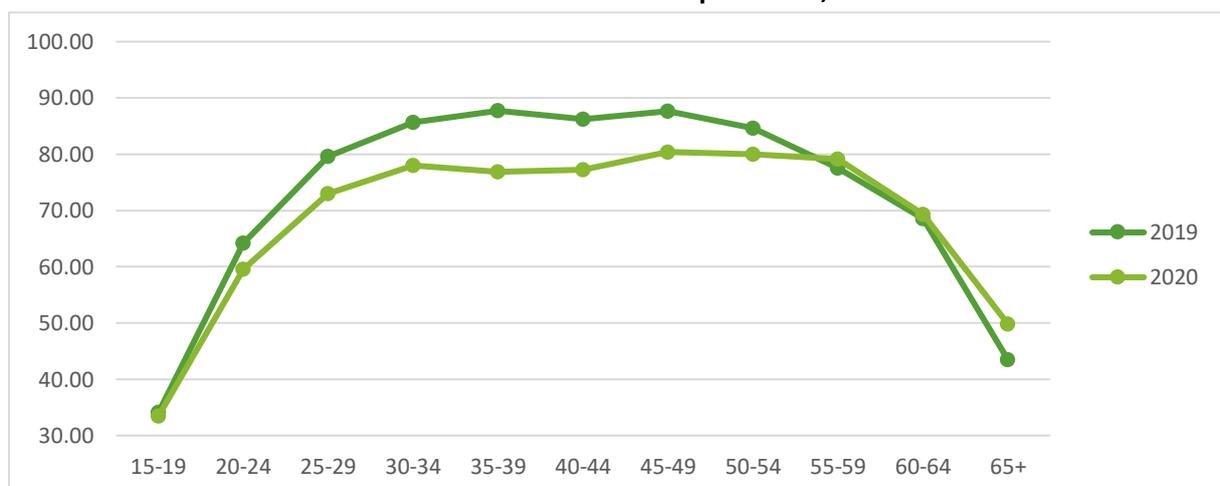
Tabel 3. Rasio Penduduk Bekerja (EPR) terhadap Total Penduduk Usia Kerja, 2018-2020

Kelompok Umur	2018	2019	2020
EPR Penduduk 15 +	76,64	74,23	69,07
Laki-laki	83,66	83,03	76,01
Perempuan	68,61	64,31	61,22
Perkotaan	59,68	58,76	58,51
Perdesaan	83,68	80,68	73,56
EPR Penduduk Usia 15-24	49,91	48,97	46,65
Laki-laki	53,54	52,40	49,44
Perempuan	45,82	45,29	43,59
Perkotaan	27,14	28,88	26,21
Perdesaan	59,97	57,40	55,43
EPR Penduduk Usia 25 Tahun +	84,28	81,66	75,57
Laki-laki	92,18	91,79	83,57
Perempuan	75,19	70,08	66,42
Perkotaan	69,52	67,60	67,95
Perdesaan	90,29	87,51	78,79

Sumber: Sakernas 2018-2020, data diolah

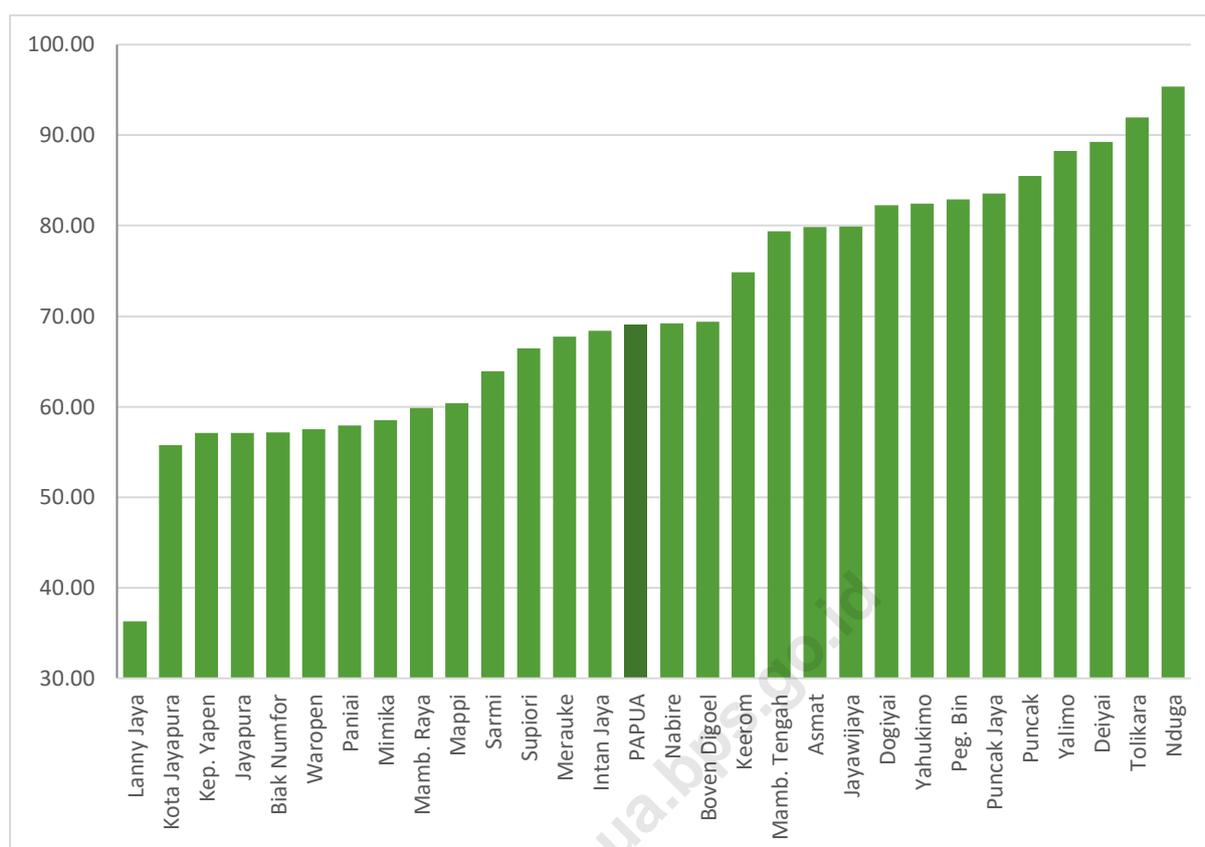
Jika EPR diklasifikasikan berdasarkan kelompok umur sebagaimana ditunjukkan di tabel 3, dapat dilihat bahwa pada Agustus 2020, EPR Penduduk Dewasa (25 tahun ke atas) sebesar 75,57 persen jauh lebih besar dibandingkan EPR Penduduk Usia Muda (15-24 tahun) yang hanya sebesar 46,65 persen. Selisih yang jauh ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia muda tidak terlibat dalam pasar kerja tetapi masuk dalam kelompok bukan angkatan kerja karena bersekolah.

Gambar 4. Pola EPR menurut Kelompok Umur, 2019-2020



Sumber: Sakernas 2019-2020, data diolah

Gambar 5. EPR Menurut Kabupaten/Kota, Agustus 2020



Sumber: Sakernas 2020, data diolah

Jika diamati menurut kabupaten/kota, terlihat pada Gambar 5 bahwa pada Agustus 2020, terdapat 14 kabupaten/kota dengan EPR di bawah angka Provinsi Papua (69,07 persen). Rendahnya rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja adalah karena persentase penduduk pengangguran dan penduduk bukan angkatan kerja yang cukup tinggi.

KILM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Kategorisasi penduduk bekerja menurut status pekerjaan dapat membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu negara. Selama bertahun-tahun, dan dengan kemajuan pembangunan, suatu negara biasanya akan mengharapkan untuk dapat melihat pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan pada jumlah pekerja yang digaji (buruh/ karyawan/pegawai) dan penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya berkontribusi/bekerja di sektor pertanian.

Tabel 4. Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2019-2020

INDIKATOR	2019		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%
TOTAL	1.792.157	100,00	1.691.745	100,00
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	356.692	19,90	324.745	19,20
Berusaha	899.635	50,20	863.193	51,02
Pengusaha	14.418	0,80	15.009	0,89
Berusaha sendiri+berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	863.142	48,16	823.357	48,67
Pekerja bebas	22.075	1,23	24.827	1,47
Pekerja keluarga	535.830	29,90	503.807	29,78
Pekerja rentan	1.421.047	79,29	1.351.991	79,92
Laki-laki	1.062.372	100,00	988.727	100,00
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	269.978	25,41	269.978	27,31
Berusaha	676.569	63,68	676.569	68,43
Pengusaha	11.900	1,12	11.900	1,20
Berusaha sendiri+berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	647.795	60,98	647.795	65,52
Pekerja bebas	16.874	1,59	16.874	1,71
Pekerja keluarga	104.372	9,82	104.372	10,56
Pekerja rentan	769.041	72,39	769.041	77,78
Perempuan	729.785	100,00	703.018	100,00
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	95.914	13,14	95.914	13,64
Berusaha	195.216	26,75	195.216	27,77
Pengusaha	1.748	0,24	1.748	0,25
Berusaha sendiri+berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	190.439	26,10	190.439	27,09
Pekerja bebas	3.029	0,42	3.029	0,43
Pekerja keluarga	432.981	59,33	432.981	61,59
Pekerja rentan	626.449	85,84	626.449	89,11

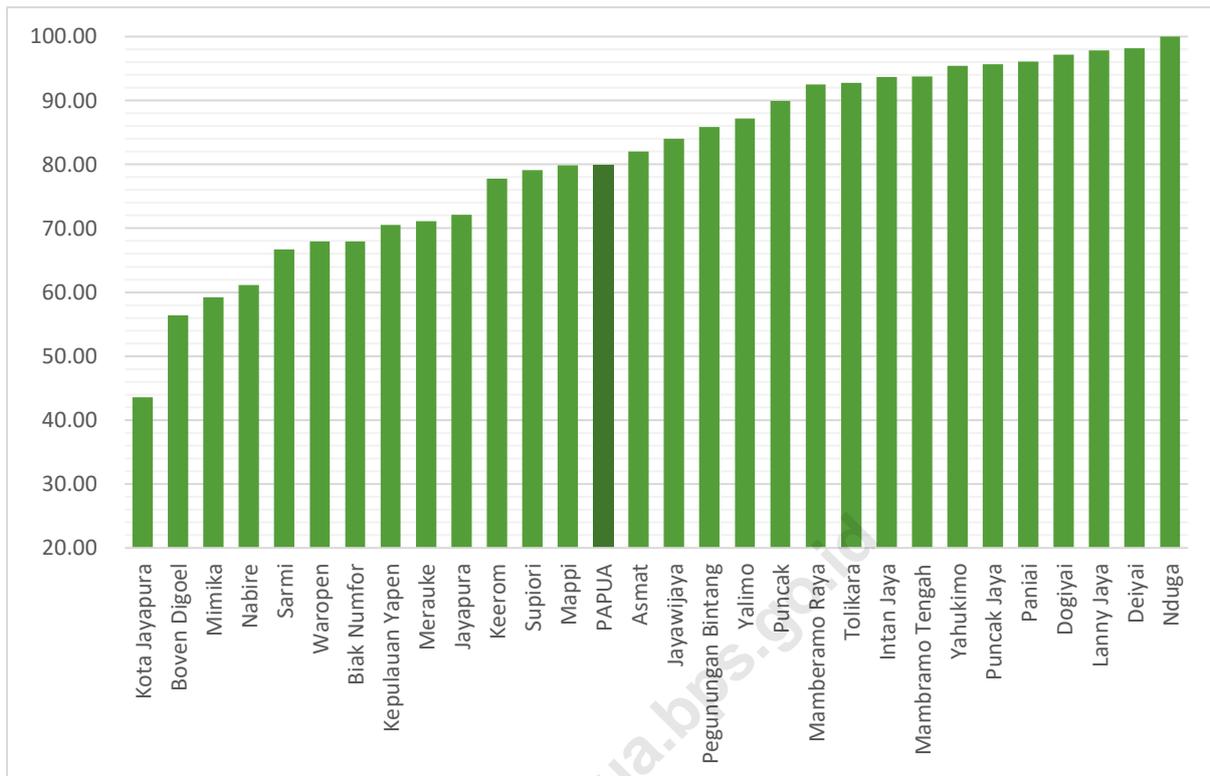
Sumber: Sakernas 2019-2020, data diolah

Tabel 4 menunjukkan jumlah dan persentase penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama. Pada Agustus 2020, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan persentase pada penduduk yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai, pengusaha, dan pekerja keluarga. Sementara itu, penduduk yang berstatus berusaha sendiri dan yang tergolong sebagai pekerja rentan, meningkat secara persentase.

Dari sudut pandang gender, terlihat bahwa penduduk bekerja masih didominasi oleh laki-laki. Pada Agustus 2020, 988.727 orang penduduk bekerja berjenis kelamin laki-laki sedangkan perempuan berjumlah 703.018 orang. Tidak bisa dipungkiri jika pekerja rentan lebih didominasi oleh pekerja perempuan. Pada semua status pekerjaan utama, pekerja perempuan memiliki persentase yang lebih rendah dari pekerja laki-laki kecuali status sebagai pekerja keluarga yang membantu keluarganya untuk memperoleh penghasilan. Dalam hal ini, pekerja keluarga yang dimaksud adalah mereka yang membantu keluarga atau suami dalam mencari nafkah tanpa diberi upah, contohnya istri membantu suaminya berkebun, beternak, jualan di kios, dll.

Persentase pekerja rentan menurut kabupaten/kota dapat diamati pada gambar di bawah ini. Dengan mengurutkan persentase pekerja rentan dari terendah hingga yang tertinggi dapat lebih mudah untuk dianalisa. Dari grafik yang tersaji terlihat bahwa persentase pekerja rentan di sebagian besar kabupaten masih sangat tinggi. Kota Jayapura (43,53 persen) merupakan kabupaten yang memiliki persentase pekerja rentan di bawah 50 persen. Sisanya, 28 kabupaten memiliki persentase pekerja rentan di atas 50 persen. Tingginya pekerja rentan di hampir semua kabupaten mengindikasikan masih rendahnya produktivitas, dan tingkat kesejahteraan penduduk. Hal ini ditengarai karena sebagian besar pekerja berpendidikan SD ke bawah, terserap di sektor pertanian dan dengan status bekerja sendiri, dibantu buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga.

Gambar 6. Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Pekerja Rentan Menurut Kabupaten/Kota, 2020



Sumber: Sakernas 2020, data diolah

KILM 4, Penduduk yang Bekerja Menurut Sektor

Informasi sektoral dapat digunakan untuk mengidentifikasi distribusi dan pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam buku teks pembangunan ekonomi, tenaga kerja cenderung berpindah dari pertanian dan aktifitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa-jasa. Dalam konteks ruang/spasial pekerja berpindah dari desa ke kota, Proses tersebut dapat dikatakan sebagai peralihan aktivitas ekonomi dari yang bersifat tradisional ke aktivitas ekonomi modern.

Untuk kepentingan analisis, aktivitas sektor dalam perekonomian dibagi menjadi 3 (tiga) sektor berdasarkan pada definisi sektor *International Standard Industrial Classification (ISIC) System* (Revisi 2 dan Revisi 3), yaitu:

1. *Agriculture*/Pertanian
2. *Manufacture*/Manufaktur
3. *Services*/Jasa-Jasa

Tabel 5. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2019-2020

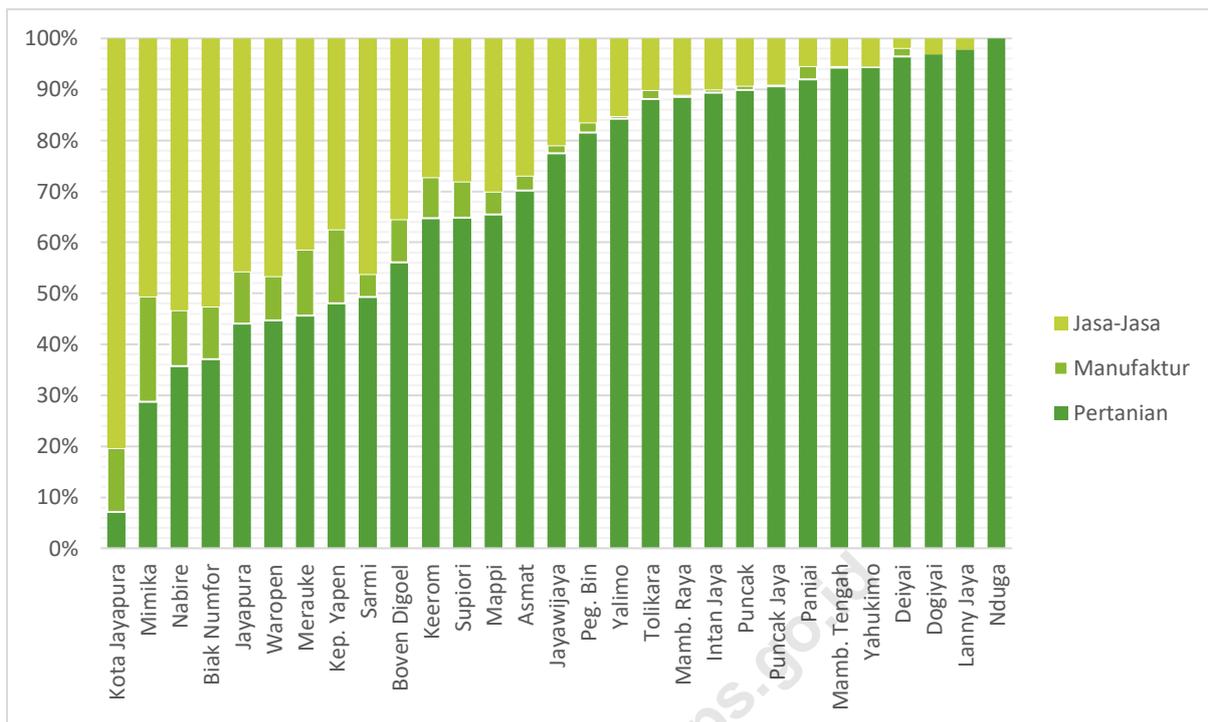
INDIKATOR	2019		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Pertanian	1.224.039	68,30	1.131.950	66,91
Manufaktur	102.433	5,72	97.421	5,76
Jasa-Jasa	465.685	25,98	462.374	27,33
TOTAL	1.792.157	100,00	1.691.745	100,00
Pertanian	668.534	62,93	619.900	62,70
Manufaktur	89.232	8,40	82.607	8,35
Jasa-Jasa	304.606	28,67	286.220	28,95
LAKI-LAKI	1.062.372	100,00	988.727	100,00
Pertanian	555.505	76,12	512.050	72,84
Manufaktur	13.201	1,81	14.814	2,11
Jasa-Jasa	161.079	22,07	176.154	25,06
PEREMPUAN	729.785	100,00	703.018	100,00

Sumber: Sakernas 2019-2020, data diolah

Hasil Sakernas Agustus 2020 menunjukkan bahwa distribusi ketenagakerjaan di Provinsi Papua, masih didominasi sektor pertanian. Terbukti secara sektoral proporsi jumlah penduduk yang bekerja pada sektor ini mencapai 66,91 persen, kemudian disusul sektor jasa sebesar 27,33 persen. Persentase penduduk bekerja sektor pertanian ini menurun 1,39 pesen jika dibandingkan Agustus 2019 yang berada pada kisaran 68,30 persen. Sementara sektor jasa mengalami peningkatan sekitar 1,35 persen dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan juga terjadi pada sektor manufaktur yang sekarang berada di angka 5,76 persen dari semula 5,72 persen pada Agustus 2019.

Jika melihat sebarannya di kabupaten/kota pada Gambar 7, hal serupa dapat terlihat bahwa pada kondisi Agustus 2020 hampir di semua kabupaten/kota didominasi oleh pekerja di Sektor Pertanian dan Sektor Jasa. Pola yang sama juga ditemui di tahun sebelumnya.

Gambar 7. Persentase Pekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Kabupaten/Kota, 2020



Sumber: Sakernas 2020, data diolah

KILM 5. Pekerja Paruh Waktu

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja serta pada tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Mengukur tingkat dan tren di jam-jam bekerja di masyarakat, untuk berbagai kelompok pekerja dan untuk pekerja secara individu menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi. Indikator pekerja paruh waktu berfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari *full time*, yang merupakan proporsi dari total pekerja. Untuk kasus Indonesia, batas yang digunakan adalah bekerja kurang dari 35 jam seminggu.

Tabel 6. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Penggunaan Waktu, 2019-2020

INDIKATOR	2019	2020
Jumlah Penduduk yang Bekerja	1.792.157	1.691.745
Laki-laki	1.062.372	988.727
Perempuan	729.785	703.018
Perkotaan	417.099	427.370
Perdesaan	1.375.058	1.264.375
Jumlah Pekerja Paruh Waktu	793.071	849.225
Laki-laki	403.015	452.213
Perempuan	390.056	397.012
Perkotaan	88.084	122.040
Perdesaan	704.987	727.185
Tingkat Pekerja Paruh Waktu (%)	44,25	50,20
Laki-laki	37,94	45,74
Perempuan	53,45	56,47
Perkotaan	21,12	28,56
Perdesaan	51,27	57,51
Share Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu	49,18	46,75

Sumber: Sakernas 2020, data diolah

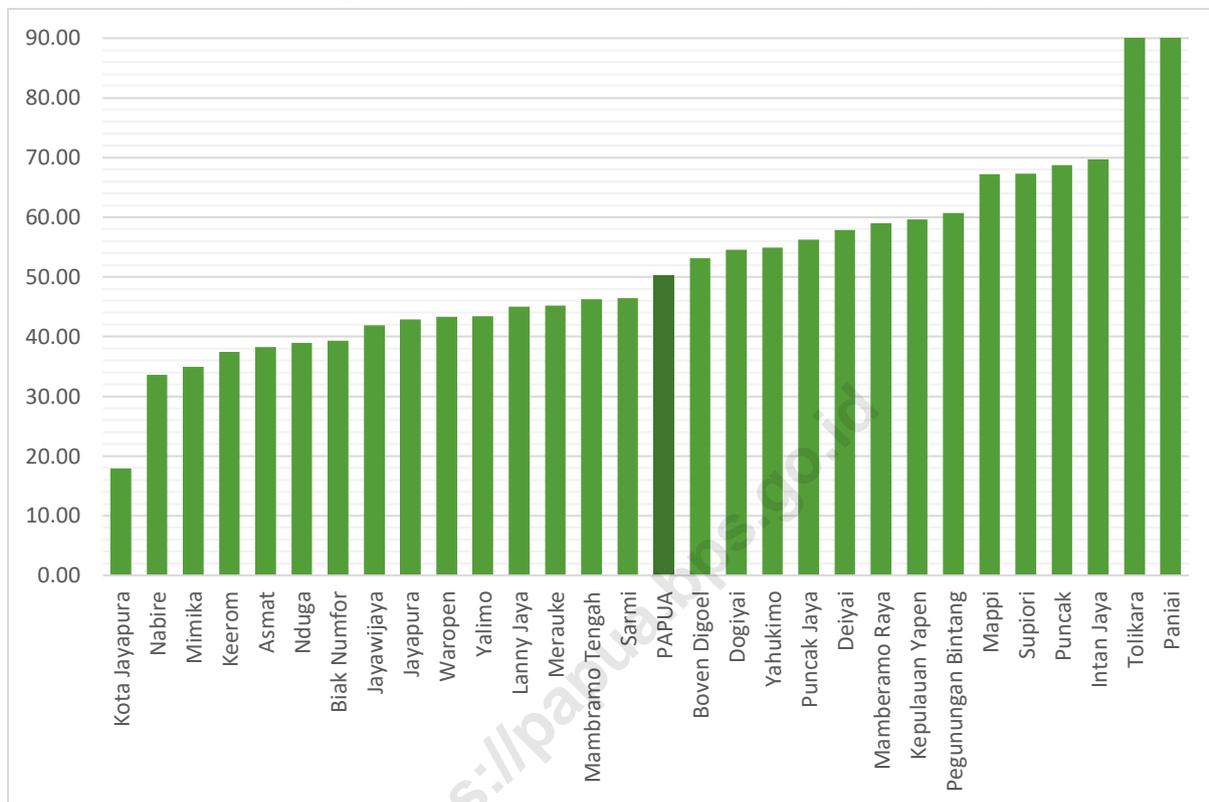
Pada Agustus 2020, tingkat pekerja paruh waktu mencapai 50,20 persen, meningkat 5,95 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Arti dari angka 50,20 persen tersebut yaitu dari 100 orang yang bekerja pada Agustus 2020, sekitar 50 orang diantaranya merupakan pekerja paruh waktu atau bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan tidak sedang mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Sementara itu, *share* perempuan pada seluruh pekerja paruh waktu terlihat menurun. Dari sekitar 49,18 persen pada Agustus 2019 menjadi 46,75 pada tahun ini. Artinya adalah pada Agustus 2020, dari 100 orang pekerja paruh waktu, sekitar 46-47 diantaranya adalah perempuan.

Berdasarkan klasifikasi wilayah tempat tinggalnya, terlihat bahwa pada Agustus 2020, tingkat pekerja paruh waktu meningkat baik pada wilayah perkotaan maupun perdesaan. Tingkat pekerja paruh waktu di perdesaan jauh lebih tinggi daripada perkotaan, masing-masing yaitu 57,51 persen di perdesaan dan 28,56 persen di perkotaan.

Jika dilihat sebarannya menurut kabupaten/kota, pada tahun 2020 tingkat pekerja paruh waktu tertinggi berada di Kabupaten Paniai yaitu sebesar 98,57 persen dan terendah berada di Kota

Jayapura yaitu sebesar 17,92 persen. Semakin rendahnya persentase pekerja paruh waktu di suatu kabupaten/kota, maka dapat diketahui bahwa produktivitas dan kesejahteraan penduduk yang bekerja semakin lebih baik.

Gambar 8. Tingkat Pekerja Paruh Waktu menurut Kabupaten/Kota, 2020



Sumber: Sakernas 2020, data diolah

KILM 6. Jam Kerja

KILM ini bertujuan untuk menunjukkan jumlah orang yang bekerja menurut jam kerja (biasanya atau sebenarnya): kurang dari 25 jam kerja perminggu, antara 25 dan 34 jam, antara 35 dan 39 jam, antara 40-48 jam, antara 49-59 jam, 60 jam ke atas.

Hasil Sakernas Agustus 2020 menunjukkan bahwa kurang dari separuh penduduk bekerja di Provinsi Papua bekerja pada jam kerja normal (di atas 35 jam per minggu), yaitu sebanyak 816.660 orang atau sekitar 48,27 persen. Sementara sisanya, 51,73 persen bekerja di bawah jam kerja normal. Penduduk yang bekerja dengan jam kerja di atas 35 jam per minggu didominasi oleh penduduk laki-laki dan tinggal di wilayah perdesaan.

Tabel 7. Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, Tahun 2020

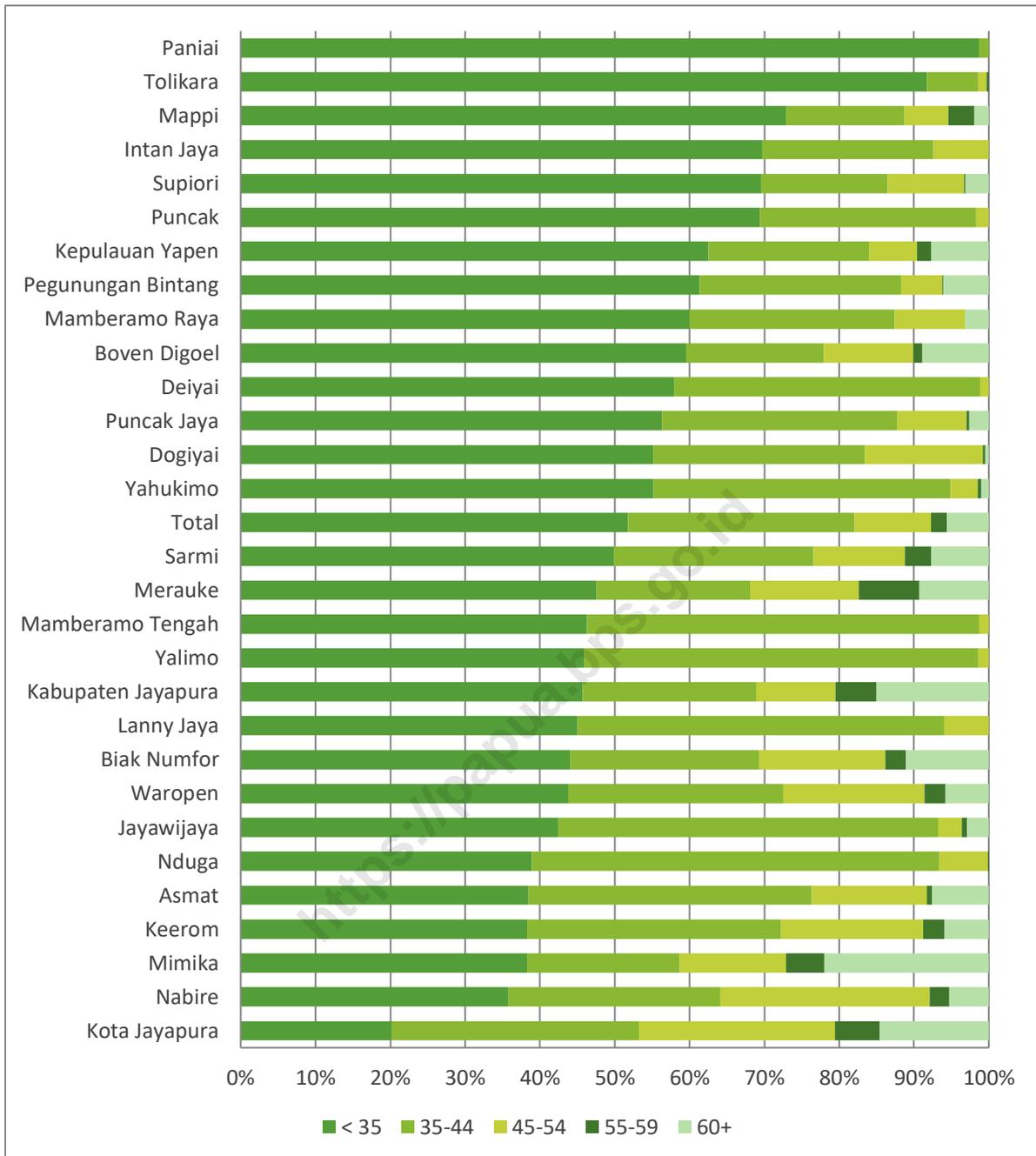
Indikator	Laki-laki	Perempuan	Total
0 jam	16.527	9.333	25.860
1-14 jam	47.996	58.267	106.263
15-24 jam	163.485	176.511	339.996
25-34 jam	240.732	162.234	402.966
35-44 jam	303.130	210.096	513.226
45-54 jam	124.851	46.906	171.757
55-59 jam	26.050	10.147	36.197
60+ jam	65.956	29.524	95.480

Indikator	Perkotaan	Perdesaan	Total
0 jam	12.407	13.453	25.860
1-14 jam	25.702	80.561	106.263
15-24 jam	41.569	298.427	339.996
25-34 jam	54.769	348.197	402.966
35-44 jam	126.330	386.896	513.226
45-54 jam	79.533	92.224	171.757
55-59 jam	20.956	15.241	36.197
60+ jam	66.104	29.376	95.480

Sumber: Sakernas 2020, data diolah

Pekerja laki-laki dan perempuan paling banyak bekerja dengan jumlah jam kerja 35-44 jam per minggu. Begitu juga dari segi wilayahnya, pekerja di perkotaan dan pedesaan paling banyak bekerja di kisaran jam kerja 35-44 jam per minggu. Dapat dilihat juga pada wilayah perkotaan, cukup banyak pekerja yang memiliki jumlah jam kerja 60 jam lebih per minggu. Hal ini menunjukkan tingginya produktivitas pekerja di wilayah perkotaan.

Gambar 9. Persentase Pekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2020



Sumber: Sakernas 2020, data diolah

Jika diamati dari distribusi penduduk bekerja pada level kabupaten/kota pada Gambar 9, dapat diketahui bahwa Kabupaten Paniai adalah kabupaten dengan persentase penduduk bekerja di bawah jam normal terbesar di Provinsi Papua dengan 98,70 persen. Disusul oleh Kabupaten Tolikara, dan Mappi yang memiliki persentase penduduk bekerja di bawah jam normal di atas 70 persen. Sementara itu, Kota Jayapura dan Kabupaten Nabire adalah dua kabupaten/kota yang memiliki persentase penduduk bekerja di bawah jam normal terendah di Provinsi Papua, masing-masing adalah 20,20 persen dan 35,80 persen.

KILM 7. Tenaga Kerja Sektor Informal

Pekerja di sektor informal terkait perkiraan jumlah orang yang bekerja di sektor informal dibandingkan dengan jumlah orang bekerja. Dalam hal ukuran dan pertumbuhan, sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. Konferensi Internasional Statistik Perburuhan (ICLS) ke-15 mendefinisikan sektor informal sebagai unit produksi dalam usaha rumahtangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Mereka yang bekerja di sektor informal terdiri dari semua orang yang selama periode acuan tertentu, yang bekerja di setidaknya satu unit produksi yang memenuhi konsep sektor informal, terlepas dari status mereka dalam pekerjaan dan apakah itu pekerjaan utama atau pekerjaan sekunder. Resolusi ICLS memperbolehkan beberapa variasi konsep nasional. Akibatnya, informasi untuk indikator sering didasarkan pada definisi nasional dan pengukuran ekonomi informal. BPS melakukan pendekatan khusus dalam menentukan pekerja sektor formal/informal yaitu berdasarkan status dalam pekerjaan utama dari jenis pekerjaan/jabatan,

Tabel 8. Jumlah dan Persentase Pekerja Menurut Sektor, 2019-2020

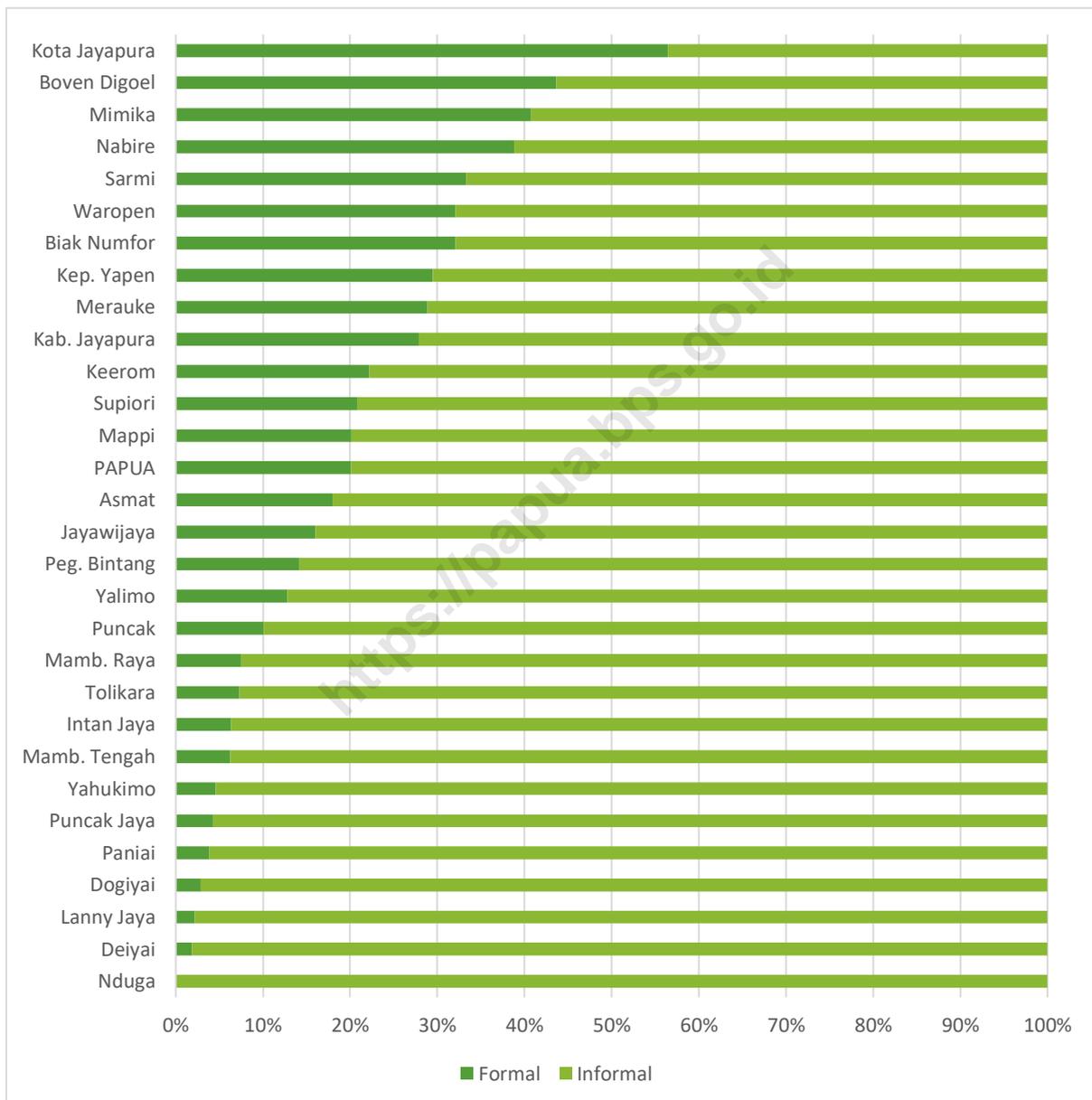
Indikator	2019	%	2020	%
Penduduk 15+ yang bekerja	1.792.157	100,00	1.691.745	100,00
Laki-laki	1.062.372	59,28	988.727	58,44
Perempuan	729.785	40,72	703.018	41,56
Perkotaan	417.099	23,27	427.370	25,26
Perdesaan	1.375.058	76,73	1.264.375	74,74
Jumlah pekerja formal	371.110	20,71	339.754	20,08
Laki-laki	277.841	74,87	246.358	72,51
Perempuan	93.269	25,13	93.396	27,49
Perkotaan	229.186	61,76	211.489	62,25
Perdesaan	141.924	38,24	128.265	37,75
Jumlah pekerja informal	1.421.047	79,29	1.351.991	79,92
Laki-laki	784.531	55,21	742.369	54,91
Perempuan	636.516	44,79	609.622	45,09
Perkotaan	187.913	13,22	215.881	15,97
Perdesaan	1.233.134	86,78	1.136.110	84,03

Sumber: Sakernas 2019-2020, data diolah

Pada Tabel 8 dapat dilihat sebaran pekerja di sektor formal dan informal yang diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin maupun wilayah tempat tinggal. Terlihat bahwa pada Agustus 2020, proporsi pekerja yang bekerja di sektor informal mencapai 79,92 persen sedangkan untuk sektor formal sekitar 20,08 persen. Jika dibandingkan dengan kondisi Agustus 2019, sektor informal

mengalami kenaikan sebesar 0,62 persen. Sebaliknya, sektor formal mengalami penurunan dengan persentase yang sama. Sektor formal didominasi oleh pekerja laki-laki dengan persentase 72,51 persen. Jika dilihat dari wilayahnya, pekerja sektor formal lebih banyak berada di wilayah perkotaan. Sementara itu, pada sektor informal, perbedaan *share* antara laki-laki dan perempuan tidak sebesar yang terjadi di sektor formal. Pada sektor ini, pekerja jauh lebih banyak berada di wilayah perdesaan.

Gambar 10. Persentase Pekerja Menurut Sektor dan Kabupaten/Kota, 2020



Sumber: Sakernas 2020, data diolah

Gambar 10 menampilkan sebaran pekerja sektor formal dan informal di masing-masing kabupaten/kota. Dapat dilihat bahwa pekerja di sektor informal mendominasi hampir di seluruh kabupaten di Provinsi Papua. Hanya Kota Jayapura yang memiliki persentase pekerja sektor formal lebih besar dari sektor informal.

3.3. INDIKATOR PENGANGGURAN, *UNDEREMPLOYMENT* DAN KETIDAKAKTIFAN

KILM 8. Pengangguran

Tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Ini tidak boleh disalahartikan sebagai kesulitan ekonomi, meskipun korelasi antara tingkat pengangguran dan kemiskinan sering ada dan cenderung memiliki korelasi negatif. Definisi baku untuk penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, dan bersedia untuk bekerja,

Tingkat pengangguran oleh banyak negara digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan. Jika bekerja diambil sebagai situasi yang diinginkan bagi orang-orang dalam populasi yang secara ekonomi aktif (angkatan kerja), maka pengangguran menjadi situasi yang tidak diinginkan. Namun, beberapa pengangguran jangka pendek dapat diinginkan dan diperlukan untuk memastikan penyesuaian (*adjustment*) terhadap fluktuasi ekonomi. Tingkat pengangguran pada kelompok tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan pendidikan berguna dalam mengidentifikasi kelompok pekerja dan sektor-sektor yang paling rentan terhadap pengangguran,

Tingkat pengangguran dapat dianggap sebagai indikator Informatif yang paling mencerminkan kondisi pasar secara umum dan kinerja pasar tenaga kerja serta ekonomi secara keseluruhan. Tidak harus ditafsirkan sebagai ukuran kesulitan ekonomi atau kesejahteraan. Bila didasarkan pada standar internasional yang direkomendasikan, tingkat pengangguran hanya memberikan gambaran proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tapi bersedia dan secara aktif mencari pekerjaan. Angka ini menggambarkan sumber daya ekonomi pekerja menganggur atau anggota keluarga mereka. Penggunaannya harus dibatasi sebagai ukuran pemanfaatan tenaga kerja serta indikasi kegagalan untuk mencari pekerjaan. Tindakan-tindakan lain, termasuk indikator pendapatan yang terkait, akan diperlukan untuk mengevaluasi kesulitan ekonomi,

Tingkat pengangguran secara matematis didefinisikan sebagai hasil bagi antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Harus ditekankan bahwa *denominator*/faktor pembagi yang berfungsi sebagai dasar statistik ini adalah tenaga kerja atau penduduk yang aktif secara ekonomi, bukan jumlah penduduk. Perbedaan ini tidak selalu dipahami oleh publik. Memang istilah “angkatan kerja” dan “bekerja” kadang-kadang keliru digunakan secara bergantian. Misalnya, tingkat pengangguran adalah 6 persen, maka dapat dikatakan bahwa terdapat 6 persen dari penduduk yang aktif secara ekonomi (angkatan kerja) yang saat ini sedang tidak bekerja dan mencari pekerjaan atau bersedia bekerja.

Tabel 9 menunjukkan bahwa pada Agustus 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Papua meningkat sebesar 0,77 persen dibandingkan kondisi Agustus 2019. Sejalan dengan meningkatnya jumlah pengangguran, TPT Provinsi Papua pun mengalami peningkatan.

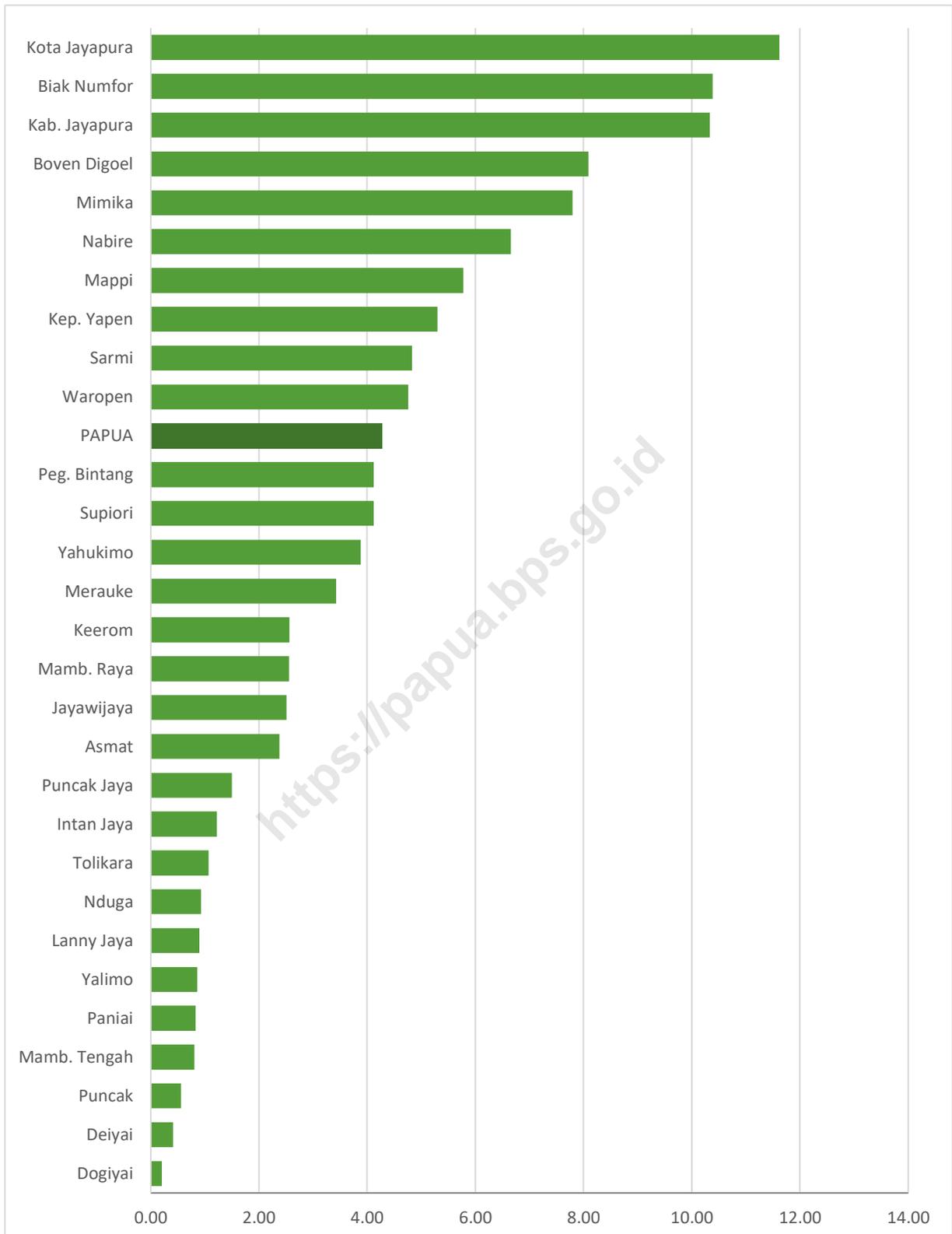
Tabel 9. Indikator Pengangguran Papua, 2019-2020

Indikator	2019	2020
Jumlah Angkatan kerja	1.857.300	1.767.403
Laki-laki	1.100.191	1.038.467
Perempuan	757.109	728.936
Perkotaan	457.120	469.440
Perdesaan	1.400.180	1.297.963
Jumlah Pengangguran	65.143	75.658
Laki-laki	37.819	49.740
Perempuan	27.324	25.918
Perkotaan	40.021	42.070
Perdesaan	25.122	33.588
TPT	3,51	4,28
Laki-laki	3,44	4,79
Perempuan	3,61	3,56
Perkotaan	8,76	8,96
Perdesaan	1,79	2,59

Sumber: Sakernas 2019-2020, data diolah

Besaran TPT tiap kabupaten/kota dapat dilihat pada Gambar 11. Grafik menunjukkan bahwa Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Deiyai menjadi kabupaten yang memiliki TPT terkecil di Provinsi Papua. Kabupaten-kabupaten lain yang memiliki TPT sangat kecil, dibawah satu persen, yaitu Kabupaten Puncak, Mamberamo Tengah, Paniai, Yalimo, Lanny Jaya dan Nduga. Dilihat dari karakteristik wilayahnya, kabupaten-kabupaten tersebut berada di wilayah pegunungan. Sementara itu Kota Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Jayapura adalah tiga wilayah yang memiliki TPT tertinggi yaitu di atas 10 persen. Beberapa kabupaten lain yang secara karakteristik merupakan wilayah perkotaan seperti Kabupaten Mimika, dan Nabire juga termasuk kabupaten dengan TPT yang cukup tinggi di Provinsi Papua.

Gambar 11. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota, 2020



Sumber: Sakernas 2020, data diolah

KILM 9. Pengangguran Pada Kelompok Pemuda

Tingkat pengangguran memberikan gambaran kepada kita mengenai proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi secara aktif mencari pekerjaan dan bersedia untuk bekerja. Pengangguran pada kelompok usia muda merupakan salah satu masalah yang perlu mendapatkan perhatian khusus bagi banyak negara seiring dengan berjalannya proses pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah “usia muda” mencakup orang yang berusia 15-24 tahun, sedangkan “orang dewasa” didefinisikan sebagai orang yang berusia 25 tahun ke atas. Indikator pengangguran kaum muda disajikan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tingkat pengangguran kaum muda
- 2) Tingkat pengangguran kaum muda sebagai persentase dari tingkat pengangguran dewasa
- 3) *Share* pengangguran kaum muda terhadap total
- 4) Pengangguran kaum muda sebagai proporsi dari populasi kaum muda

Tabel 10. Indikator Pengangguran Usia Muda di Provinsi Papua, 2019-2020

Indikator	2019	2020
Tpt Penduduk Usia Muda (%)	9,87	9,58
Laki-laki	11,10	10,66
Perempuan	8,28	8,19
Perkotaan	25,60	24,40
Perdesaan	5,66	5,83
Rasio Tpt Usia Muda Terhadap Tpt Dewasa	4,31	2,93
Laki-laki	5,39	2,86
Perempuan	3,14	3,15
Perkotaan	4,22	3,58
Perdesaan	5,58	3,07
Share Penganggur Muda Terhadap Total Penganggur (%)	45,16	35,92
Laki-laki	49,21	34,17
Perempuan	39,56	39,28
Perkotaan	40,25	33,21
Perdesaan	52,99	39,32

Sumber: Sakernas 2019-2020, data diolah

Pada Tabel 10 dapat dilihat bahwa selama periode Agustus 2019 ke Agustus 2020, terjadi penurunan TPT penduduk usia muda yaitu sebesar 0,29 persen. Diamati dari jenis kelamin, penurunan terjadi baik pada penganggur laki-laki maupun perempuan. Sementara itu, jika dilihat dari klasifikasi wilayahnya, TPT di perkotaan mengalami penurunan, sedangkan di perdesaan mengalami kenaikan.

Pada Agustus 2020, *share* penganggur muda terhadap total penganggur mengalami penurunan. Persentasenya menurun sekitar 9,24 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dari 45,16 persen menjadi 35,92 persen. Artinya, jika pada Agustus 2019 hampir separuh dari total penganggur merupakan usia muda, pada tahun ini sudah tidak lagi. Akan tetapi, persentasenya masih cukup besar. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk usia muda sudah masuk ke dalam angkatan kerja. Besar kemungkinan, mereka yang telah lulus pendidikan sudah aktif mencari pekerjaan demi pengalaman tetapi masih belum mendapatkan.

KILM 11. Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Indikator ini melihat hubungan antara pencapaian pendidikan pekerja dan pengangguran yang memberikan gambaran mengenai perubahan dalam permintaan pekerja. Informasi mengenai tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan memiliki implikasi penting bagi pekerja dan kebijakan pendidikan. Jika dikonfirmasi bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang rendah berada pada risiko yang lebih tinggi menjadi pengangguran, reaksi kebijakan yang mungkin adalah meningkatkan tingkat pendidikan mereka atau menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan keterampilan yang lebih rendah (*low skilled job*) di dalam negeri. Di sisi lain, komposisi pengangguran yang lebih tinggi di kalangan orang-orang dengan pendidikan tinggi bisa menunjukkan kurangnya pekerjaan teknis yang profesional dan tingkat tinggi.

Tabel 11 menunjukkan bahwa, pada Agustus 2020 TPT tertinggi menurut pendidikan adalah pada jenjang Sekolah Tinggi dengan besaran mencapai 8,47 persen, disusul tingkat pendidikan sekolah Menengah (6,84 persen), Sekolah Dasar (3,15 persen), kemudian Kurang dari SD (1,36 persen). Secara umum, TPT mengalami kenaikan di semua tingkat pendidikan.

Dari analisis TPT menurut tingkat pendidikan ini dapat dilihat bahwa TPT cenderung lebih besar pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Fenomena ini dimungkinkan terjadi karena mereka yang berpendidikan tinggi memilih untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan selera dan kompetensinya, sementara lapangan usaha yang sesuai dengan itu tidak mencukupi jumlahnya. Di sisi lain, mereka yang berpendidikan rendah cenderung tidak terlalu selektif dan menerima apapun pekerjaan yang tersedia.

Tabel 11. TPT Menurut Tingkat Pendidikan, 2019-2020

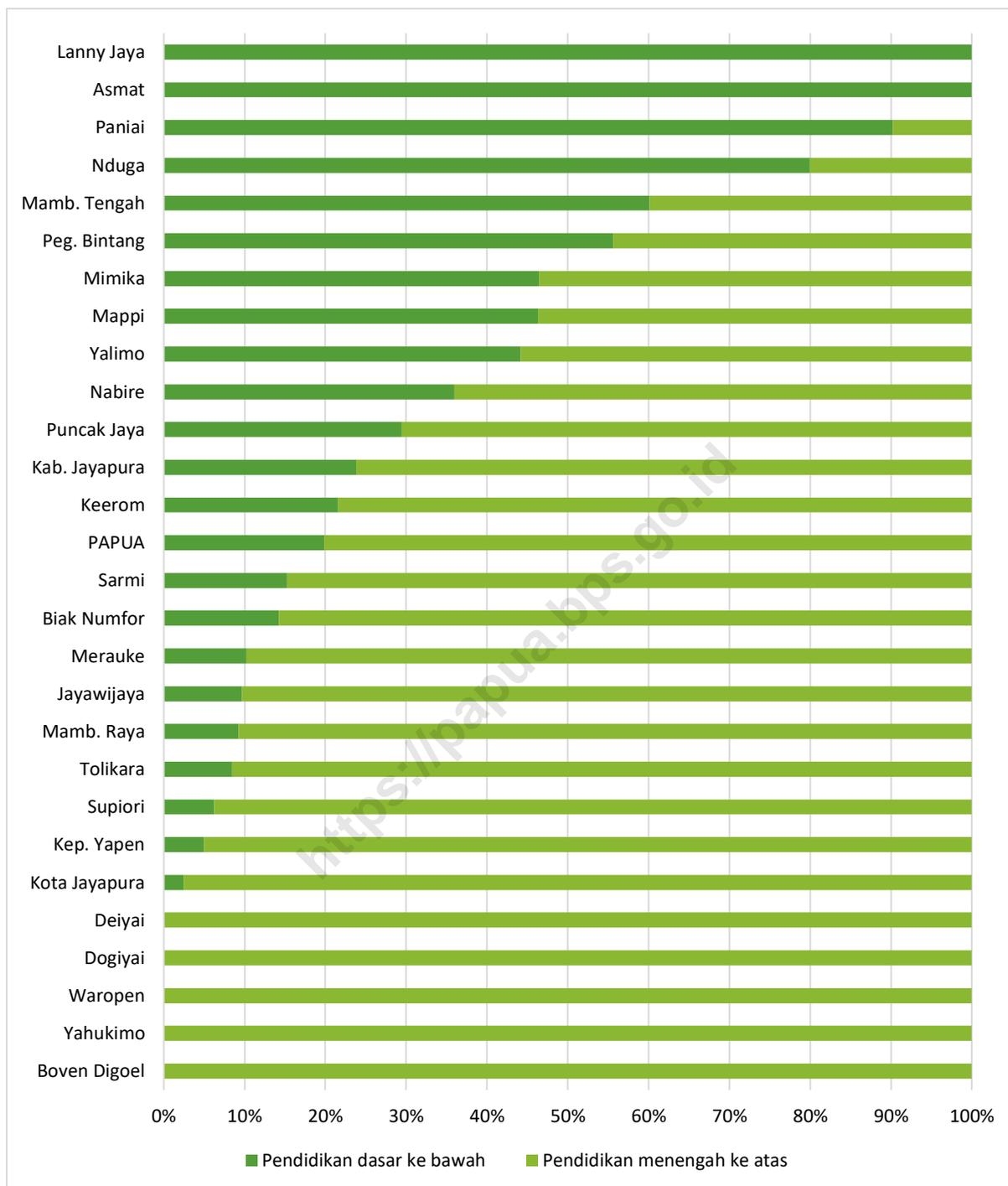
Indikator	2019	2020
Total	3,51	4,28
Kurang Dari Sd	0,72	1,36
Laki-laki	0,68	2,00
Perempuan	0,75	0,75
Perkotaan	5,10	6,57
Perdesaan	0,52	1,08
Sekolah Dasar	3,07	3,15
Laki-laki	2,50	3,86
Perempuan	3,86	2,11
Perkotaan	9,56	5,27
Perdesaan	1,51	2,59
Sekolah Menengah	6,20	6,84
Laki-laki	5,60	6,76
Perempuan	7,79	7,01
Perkotaan	9,11	9,71
Perdesaan	3,95	4,62
Sekolah Tinggi	7,87	8,47
Laki-laki	6,22	6,87
Perempuan	10,44	10,87
Perkotaan	8,63	9,93
Perdesaan	6,61	6,33

Sumber: Sakernas 2019-2020, data diolah

Jika dipisahkan menurut jenis kelamin, Tabel 11 menunjukkan bahwa pada Agustus 2020, kecuali pada tingkat pendidikan Kurang dari SD dan SD, TPT perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Sementara itu, jika dilihat dari klasifikasi wilayah tempat tinggal, TPT perkotaan selalu lebih tinggi dibandingkan perdesaan di tingkat pendidikan apapun.

Sebaran nilai TPT berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat pada Gambar 12. Pada grafik tersebut tingkat pendidikan dibedakan menjadi dua yakni pendidikan dasar ke bawah dan pendidikan menengah ke atas.

Gambar 12. Persentase Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan dan Kabupaten/Kota, 2020



Sumber: Sakernas 2020, data diolah

Pada Agustus 2020 pengangguran di Provinsi Papua didominasi oleh penduduk yang mempunyai pendidikan menengah ke atas. Hal tersebut dapat terlihat dari dominasi warna hijau muda pada Gambar 12. Untuk Provinsi Papua sendiri, persentase penganggur dengan pendidikan menengah ke atas sekitar 79,25 persen. Sisanya, 20,75 persen berpendidikan dasar ke bawah.

KILM 12. Setengah Penganggur

Mereka yang dikategorikan dalam setengah penganggur adalah mereka yang jumlah jam kerjanya di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam dalam seminggu) dan mereka masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan untuk menambah jumlah jam kerjanya. Pada Agustus 2020 tercatat total setengah pengangguran di Provinsi Papua mencapai 190.463 jiwa. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan keadaan Agustus 2019 yang mencapai 126.054 jiwa. Dari total setengah pengangguran tersebut, proporsi antara laki-laki dan perempuan tidak berbeda jauh yaitu 56,84 dan 43,16 persen. Sebagian besar (85,01 persen) setengah penganggur berada di wilayah perdesaan.

Persentase setengah penganggur terhadap angkatan kerja pada Agustus 2020 adalah 10,78 persen. Naik hampir empat persen dibandingkan Agustus 2019. Hal yang sama juga terjadi pada persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja yang mengalami kenaikan 4,22 persen dibanding kondisi Agustus 2019.

Tabel 12. Indikator Setengah Penganggur, 2019-2020

Indikator	2019	2020
Persentase Setengah Penganggur Terhadap Angkatan Kerja	6,79	10,78
Laki-laki	7,14	10,42
Perempuan	6,28	11,28
Perkotaan	3,42	6,08
Perdesaan	7,89	12,47
Persentase Setengah Penganggur Terhadap Total Penduduk Bekerja	7,03	11,26
Laki-laki	7,39	10,95
Perempuan	6,52	11,69
Perkotaan	3,75	6,68
Perdesaan	8,03	12,81

Sumber: Sakernas 2019-2020, data diolah

KILM 13. Tingkat Ketidakaktifan

Tingkat ketidakaktifan adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja suatu negara yang tidak terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan. Tingkat ketidakaktifan yang merupakan proporsi penduduk usia kerja yang tidak termasuk dalam angkatan kerja. Jika dijumlahkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (lihat KILM 1), maka hasilnya adalah 100 persen, dengan perkataan lain tingkat ketidakaktifan sama dengan 1 dikurang TPAK (1-TPAK),

Dalam beberapa situasi, tingkat ketidakaktifan tinggi untuk kelompok populasi tertentu tidak harus selalu dilihat sebagai hal yang buruk. Sebagai contoh, tingkat ketidakaktifan yang relatif tinggi untuk wanita usia 25-34 tahun dimungkinkan terjadi karena mereka meninggalkan pasar kerja untuk mengurus keluarga dan melaksanakan tanggung jawab seperti halnya mengasuh anak. Dengan menggunakan data dalam KILM 13, dapat dilihat sejauh mana pola tenaga kerja perempuan dipengaruhi oleh mereka yang berstatus sebagai ibu. Telah lama diakui bahwa aspek-aspek struktur rumah tangga terkait dengan aktivitas pasar tenaga kerja. Misalnya, perempuan sebagai kepala rumah tangga cenderung memiliki tingkat aktivitas yang relatif tinggi. Pada pasangan yang menikah, suami biasanya memiliki tingkat ketidakaktifan yang rendah, terutama jika ada anak-anak dalam keluarga. Tingkat ketidakaktifan yang rendah pada wanita bisa berkorelasi dengan tingginya tingkat ketidakaktifan untuk laki-laki, yaitu suami. Jika laki-laki sedang menyelesaikan pendidikan atau secara fisik tidak mampu bekerja, maka istri berperan sebagai pencari nafkah utama,

Tabel 13. Indikator Ketidakaktifan, 2019-2020

Indikator	2019	2020
Penduduk 15 tahun ke atas	2.414.281	2.449.145
Laki-laki	1.279.473	1.300.741
Perempuan	1.134.808	1.148.404
Perkotaan	709.851	730.420
Perdesaan	1.704.430	1.718.725
Bukan angkatan kerja	556.981	681.742
Laki-laki	179.282	262.274
Perempuan	377.699	419.468
Perkotaan	252.731	260.980
Perdesaan	304.250	420.762
Tingkat ketidakaktifan	23,07	27,84
Laki-laki	14,01	20,16
Perempuan	33,28	36,53
Perkotaan	35,60	35,73
Perdesaan	17,85	24,48

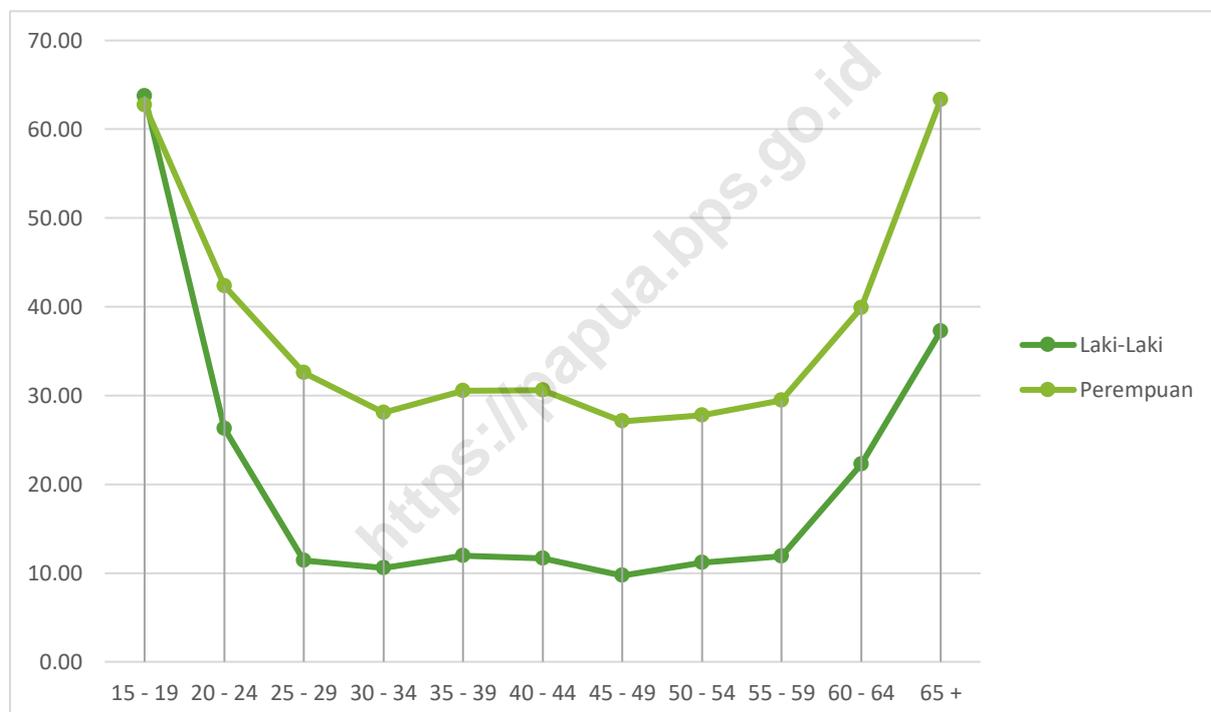
Sumber: Sakernas 2019-2020, data diolah

Pada periode Agustus 2019-2020 tingkat ketidakaktifan secara umum naik cukup signifikan, dari yang semula 23,07 persen pada Agustus 2019 menjadi 27,84 persen pada Agustus 2020. Berdasarkan jenis kelamin, tingkat ketidakaktifan baik pada laki-laki maupun perempuan mengalami

kenaikan. Pada laki-laki, kenaikan yang terjadi lebih besar, yaitu sekitar 6,15 persen, dibanding perempuan yang sekitar 3,24 persen. Dilihat dari klasifikasi wilayah tempat tinggal, kenaikan tingkat ketidakaktifan di perdesaan (6,63 persen) lebih besar dibandingkan di perkotaan (0,13 persen).

Informasi lain terkait pola ketidakaktifan menurut kelompok umur dapat dilihat pada Gambar 13. Grafik yang membentuk huruf “u” menunjukkan bahwa tingkat ketidakaktifan tinggi pada kelompok usia muda, kemudian menurun di kelompok usia produktif, dan kembali naik pada kelompok usia tua. Pola ini terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, dapat dilihat bahwa pada laki-laki, grafik menurun dengan lebih curam memasuki usia produktif. Dengan kata lain, tingkat ketidakaktifannya semakin rendah dan jauh lebih rendah dibanding perempuan.

Gambar 13. Pola Tingkat Ketidakaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2020



Sumber: Sakernas 2020, data diolah

3.4. INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf

Informasi tentang tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk menilai kemampuan penduduk di suatu negara dalam bersaing di pasar dunia. Tabel KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja dengan lima tingkat pendidikan yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat pra-dasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Dalam publikasi ini, tingkat pendidikan hanya dikategorikan dalam empat tingkat pendidikan yaitu tidak pernah bersekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan sekolah tinggi.

Tabel 14. Indikator Ketidakaktifan Menurut Pendidikan, 2019-2020

Indikator	2019	2020
Tidak pernah sekolah	13,12	21,75
Laki-laki	7,23	17,65
Perempuan	18,11	25,19
Perkotaan	40,86	32,25
Perdesaan	11,28	21,09
Sekolah dasar	28,08	30,71
Laki-laki	15,53	18,71
Perempuan	40,40	42,98
Perkotaan	41,46	41,69
Perdesaan	23,90	27,09
Sekolah Menengah	33,30	35,24
Laki-laki	19,58	24,59
Perempuan	54,19	51,25
Perkotaan	39,52	40,24
Perdesaan	27,58	30,77
Sekolah Tinggi	12,47	13,60
Laki-laki	9,91	9,72
Perempuan	16,16	18,81
Perkotaan	15,03	16,24
Perdesaan	7,78	9,41

Sumber: Sakernas 2019-2020, data diolah

Tabel 14 menunjukkan, bahwa dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2020 terjadi kenaikan tingkat ketidakaktifan penduduk usia kerja di Provinsi Papua di semua jenjang pendidikan. Kenaikan terbesar terjadi pada mereka yang tidak pernah sekolah, yaitu naik sekitar 8,63 persen dari Agustus 2019.

Apabila dilihat berdasarkan gender, pola yang sama dari tahun sebelumnya masih ditemui di tahun 2020. Tingkat ketidakaktifan pada penduduk perempuan selalu lebih tinggi dibanding laki-laki. Hal ini terjadi hampir di semua tingkat pendidikan kecuali pada tingkat pendidikan sekolah menengah.

Dilihat berdasarkan wilayah tempat tinggal, tingkat ketidakaktifan di perkotaan masih lebih tinggi daripada perdesaan. Akan tetapi, jika dilihat secara lebih detail, kenaikan tingkat ketidakaktifan di perdesaan pada tahun 2020 lebih besar, terutama di tingkat pendidikan tidak pernah sekolah yang naik sekitar 9,82 persen. Sementara itu, kenaikan tertinggi tingkat ketidakaktifan di perkotaan terjadi pada penduduk dengan tingkat pendidikan sekolah tinggi, yaitu naik sekitar 1,21 persen. Pada tingkat tidak pernah sekolah, tingkat ketidakaktifan di perkotaan menurun.

<https://papua.bps.go.id>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2020

Kabupaten/kota	Laki-laki	Perempuan	Total
Merauke	92.856	84.217	177.073
Jayawijaya	80.783	76.081	156.864
Kabupaten Jayapura	51.148	44.949	96.097
Nabire	59.215	50.730	109.945
Kepulauan Yapen	36.237	34.549	70.786
Biak Numfor	56.298	53.217	109.515
Paniai	62.465	53.678	116.143
Puncak Jaya	49.683	42.502	92.185
Mimika	92.903	67.010	159.913
Boven Digoel	25.902	21.643	47.545
Mappi	34.061	33.038	67.099
Asmat	33.047	31.040	64.087
Yahukimo	70.739	65.455	136.194
Pegunungan Bintang	27.860	23.537	51.397
Tolikara	53.996	47.293	101.289
Sarmi	15.899	13.314	29.213
Keerom	23.995	19.630	43.625
Waropen	12.056	11.235	23.291
Supiori	7.198	6.992	14.190
Mamberamo Raya	8.867	8.721	17.588
Nduga	40.251	33.274	73.525
Lanny Jaya	71.672	63.227	134.899
Mamberamo Tengah	19.683	16.123	35.806
Yalimo	25.665	22.432	48.097
Puncak	41.754	37.520	79.274
Dogiyai	32.195	33.684	65.879
Intan Jaya	18.361	17.987	36.348
Deiyai	28.155	25.679	53.834
Kota Jayapura	127.797	109.647	237.444
Provinsi Papua	1.300.741	1.148.404	2.449.145

Lampiran 2. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kelompok Umur, 2019-2020

Indikator	2019	2020
15 Tahun ke atas	2.414.281	2.449.145
Laki-laki	1.279.473	1.300.741
Perempuan	1.134.808	1.148.404
Perkotaan	709.851	730.420
Perdesaan	1.704.430	1.718.725
(15-24)	548.728	549.850
Laki-laki	284.358	288.020
Perempuan	264.370	261.830
Perkotaan	162.056	165.216
Perdesaan	386.672	384.634
(15-64)	2.322.753	2.355.418
Laki-laki	1.226.721	1.248.914
Perempuan	1.096.032	1.106.504
Perkotaan	668.972	687.544
Perdesaan	1.653.781	1.667.874
(25-54)	1.545.313	1.567.205
Laki-laki	813.261	825.919
Perempuan	732.052	741.286
Perkotaan	424.288	435.094
Perdesaan	1.121.025	1.132.111
(25-34)	606.581	610.440
Laki-laki	313.431	314.880
Perempuan	293.150	295.560
Perkotaan	170.063	170.678
Perdesaan	436.518	439.762
(35-54)	938.732	956.765
Laki-laki	499.830	511.039
Perempuan	438.902	445.726
Perkotaan	254.225	264.416
Perdesaan	684.507	692.349
(55-64)	228.712	238.363
Laki-laki	129.102	134.975
Perempuan	99.610	103.388
Perkotaan	82.628	87.234
Perdesaan	146.084	151.129
65 Tahun ke atas	91.528	93.727
Laki-laki	52.752	51.827
Perempuan	38.776	41.900
Perkotaan	40.879	42.876
Perdesaan	50.649	50.851

Lampiran 3. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2020

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Total
Merauke	78.434	45.732	124.166
Jayawijaya	70.783	57.807	128.590
Kabupaten Jayapura	37.952	23.240	61.192
Nabire	51.844	29.675	81.519
Kepulauan Yapen	24.390	18.286	42.676
Biak Numfor	39.942	29.915	69.857
Paniai	40.462	27.372	67.834
Puncak Jaya	47.692	30.488	78.180
Mimika	75.457	26.024	101.481
Boven Digoel	23.160	12.727	35.887
Mappi	27.285	15.718	43.003
Asmat	29.044	23.367	52.411
Yahukimo	65.715	51.103	116.818
Pegunungan Bintang	24.453	19.988	44.441
Tolikara	50.067	44.067	94.134
Sarmi	13.246	6.375	19.621
Keerom	20.864	12.657	33.521
Waropen	9.765	4.306	14.071
Supiori	5.614	4.222	9.836
Mamberamo Raya	6.953	3.856	10.809
Nduga	38.416	32.355	70.771
Lanny Jaya	20.793	28.653	49.446
Mamberamo Tengah	13.570	15.084	28.654
Yalimo	22.960	19.849	42.809
Puncak	37.070	31.063	68.133
Dogiyai	27.201	27.119	54.320
Intan Jaya	15.160	9.995	25.155
Deiyai	25.272	22.992	48.264
Kota Jayapura	94.903	54.901	149.804
Provinsi Papua	1.038.467	728.936	1.767.403

Lampiran 4. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur, 2019-2020

Indikator	2019	2020
15 Tahun ke atas	1.857.300	1.767.403
Laki-laki	1.100.191	1.038.467
Perempuan	757.109	728.936
Perkotaan	457.120	469.440
Perdesaan	1.400.180	1.297.963
(15-24)	298.157	283.698
Laki-laki	167.604	159.396
Perempuan	130.553	124.302
Perkotaan	62.907	57.269
Perdesaan	235.250	226.429
(15-64)	1.813.943	1.719.516
Laki-laki	1.072.857	1.005.939
Perempuan	741.086	713.577
Perkotaan	443.654	449.671
Perdesaan	1.370.289	1.269.845
(25-54)	1.344.288	1.255.275
Laki-laki	795.134	734.164
Perempuan	549.154	521.111
Perkotaan	328.356	336.012
Perdesaan	1.015.932	919.263
(25-34)	522.238	485.863
Laki-laki	303.380	280.273
Perempuan	218.858	205.590
Perkotaan	130.997	128.318
Perdesaan	391.241	357.545
(35-54)	822.050	769.412
Laki-laki	491.754	453.891
Perempuan	330.296	315.521
Perkotaan	197.359	207.694
Perdesaan	624.691	561.718
(55-64)	171.498	180.543
Laki-laki	110.119	112.379
Perempuan	61.379	68.164
Perkotaan	52.391	56.390
Perdesaan	119.107	124.153
65 Tahun ke atas	43.357	47.887
Laki-laki	27.334	32.528
Perempuan	16.023	15.359
Perkotaan	13.466	19.769
Perdesaan	29.891	28.118

Lampiran 5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2020

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Total
Merauke	84,47	54,30	70,12
Jayawijaya	87,62	75,98	81,98
Kabupaten Jayapura	74,20	51,70	63,68
Nabire	87,55	58,50	74,15
Kepulauan Yapen	67,31	52,93	60,29
Biak Numfor	70,95	56,21	63,79
Paniai	64,78	50,99	58,41
Puncak Jaya	95,99	71,73	84,81
Mimika	81,22	38,84	63,46
Boven Digoel	89,41	58,80	75,48
Mappi	80,11	47,58	64,09
Asmat	87,89	75,28	81,78
Yahukimo	92,90	78,07	85,77
Pegunungan Bintang	87,77	84,92	86,47
Tolikara	92,72	93,18	92,94
Sarmi	83,31	47,88	67,17
Keerom	86,95	64,48	76,84
Waropen	81,00	38,33	60,41
Supiori	77,99	60,38	69,32
Mamberamo Raya	78,41	44,22	61,46
Nduga	95,44	97,24	96,25
Lanny Jaya	29,01	45,32	36,65
Mamberamo Tengah	68,94	93,56	80,03
Yalimo	89,46	88,49	89,01
Puncak	88,78	82,79	85,95
Dogiyai	84,49	80,51	82,45
Intan Jaya	82,57	55,57	69,21
Deiyai	89,76	89,54	89,65
Kota Jayapura	74,26	50,07	63,09
Provinsi Papua	79,84	63,47	72,16

Lampiran 6. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2020

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Total
Merauke	75.811	44.097	119.908
Jayawijaya	68.762	56.599	125.361
Kabupaten Jayapura	34.008	20.863	54.871
Nabire	48.450	27.644	76.094
Kepulauan Yapen	23.358	17.058	40.416
Biak Numfor	34.433	28.170	62.603
Paniai	39.900	27.372	67.272
Puncak Jaya	46.522	30.488	77.010
Mimika	69.854	23.713	93.567
Boven Digoel	21.056	11.927	32.983
Mappi	25.280	15.240	40.520
Asmat	28.209	22.956	51.165
Yahukimo	62.913	49.373	112.286
Pegunungan Bintang	23.231	19.380	42.611
Tolikara	49.140	43.989	93.129
Sarmi	12.521	6.152	18.673
Keerom	20.363	12.300	32.663
Waropen	9.308	4.093	13.401
Supiori	5.357	4.074	9.431
Mamberamo Raya	6.733	3.800	10.533
Nduga	37.856	32.257	70.113
Lanny Jaya	20.416	28.586	49.002
Mamberamo Tengah	13.440	14.984	28.424
Yalimo	22.641	19.801	42.442
Puncak	36.790	30.963	67.753
Dogiyai	27.088	27.119	54.207
Intan Jaya	15.017	9.831	24.848
Deiyai	25.166	22.898	48.064
Kota Jayapura	85.104	47.291	132.395
Provinsi Papua	988.727	703.018	1.691.745

Lampiran 7. Ratio Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2020

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Total
Merauke	81,64	52,36	67,72
Jayawijaya	85,12	74,39	79,92
Kabupaten Jayapura	66,49	46,41	57,10
Nabire	81,82	54,49	69,21
Kepulauan Yapen	64,46	49,37	57,10
Biak Numfor	61,16	52,93	57,16
Paniai	63,88	50,99	57,92
Puncak Jaya	93,64	71,73	83,54
Mimika	75,19	35,39	58,51
Boven Digoel	81,29	55,11	69,37
Mappi	74,22	46,13	60,39
Asmat	85,36	73,96	79,84
Yahukimo	88,94	75,43	82,45
Pegunungan Bintang	83,38	82,34	82,91
Tolikara	91,01	93,01	91,94
Sarmi	78,75	46,21	63,92
Keerom	84,86	62,66	74,87
Waropen	77,21	36,43	57,54
Supiori	74,42	58,27	66,46
Mamberamo Raya	75,93	43,57	59,89
Nduga	94,05	96,94	95,36
Lanny Jaya	28,49	45,21	36,32
Mamberamo Tengah	68,28	92,94	79,38
Yalimo	88,22	88,27	88,24
Puncak	88,11	82,52	85,47
Dogiyai	84,14	80,51	82,28
Intan Jaya	81,79	54,66	68,36
Deiyai	89,38	89,17	89,28
Kota Jayapura	66,59	43,13	55,76
Provinsi Papua	76,01	61,22	69,07

Lampiran 8. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pekerjaan Utama, 2020

Kabupaten/Kota	Bekerja dengan upah/gaji	Pengusaha	Berusaha sendiri+Berusaha dibantu buruh tak tetap/tak dibayar
Merauke	31.864	2.748	53.628
Jayawijaya	19.744	326	56.705
Kabupaten Jayapura	14.400	893	29.514
Nabire	28.695	860	36.196
Kepulauan Yapen	10.707	1.203	22.610
Biak Numfor	19.262	814	31.036
Paniai	2.561	47	46.944
Puncak Jaya	3.321	-	41.354
Mimika	35.924	2.243	44.168
Boven Digoel	13.772	621	12.532
Mappi	7.253	915	23.778
Asmat	8.902	305	27.376
Yahukimo	5.084	55	54.504
Pegunungan Bintang	5.612	432	18.884
Tolikara	6.640	141	48.228
Sarmi	6.112	105	8.448
Keerom	7.091	159	15.432
Waropen	4.220	79	7.983
Supiori	1.969	-	5.504
Mamberamo Raya	772	21	5.699
Nduga	-	-	28.679
Lanny Jaya	1.070	-	19.114
Mamberamo Tengah	1.771	-	12.336
Yalimo	5.020	424	22.062
Puncak	6.811	-	25.994
Dogiyai	1.262	293	37.785
Intan Jaya	1.576	-	14.754
Deiyai	896	-	29.333
Kota Jayapura	72.434	2.325	42.777
Provinsi Papua	324.745	15.009	823.357

Ket : “-” = Data tidak tersedia.

Lampiran 8. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2020 (Lanjutan)

Kabupaten/Kota	Pekerja Bebas	Pekerja Keluarga	Pekerja Rentan
Merauke	7.903	23.765	85.296
Jayawijaya	262	48.324	105.291
Kabupaten Jayapura	1.330	8.734	39.578
Nabire	1.269	9.074	46.539
Kepulauan Yapen	514	5.382	28.506
Biak Numfor	2.835	8.656	42.527
Paniai	-	17.720	64.664
Puncak Jaya	-	32.335	73.689
Mimika	777	10.455	55.400
Boven Digoel	1.209	4.849	18.590
Mappi	879	7.695	32.352
Asmat	1.041	13.541	41.958
Yahukimo	-	52.643	107.147
Pegunungan Bintang	-	17.683	36.567
Tolikara	-	38.120	86.348
Sarmi	538	3.470	12.456
Keerom	1.011	8.970	25.413
Waropen	104	1.015	9.102
Supiori	236	1.722	7.462
Mamberamo Raya	40	4.001	9.740
Nduga	-	41.434	70.113
Lanny Jaya	-	28.818	47.932
Mamberamo Tengah	87	14.230	26.653
Yalimo	-	14.936	36.998
Puncak	-	34.948	60.942
Dogiyai	-	14.867	52.652
Intan Jaya	-	8.518	23.272
Deiyai	-	17.835	47.168
Kota Jayapura	4.792	10.067	57.636
Provinsi Papua	24.827	503.807	1.351.991

Ket : “-” = Data tidak tersedia.

Lampiran 9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2020

Kabupaten/Kota	Pertanian	Manufaktur	Jasa-Jasa
Merauke	54.777	15.420	49.711
Jayawijaya	97.168	1.969	26.224
Kabupaten Jayapura	24.183	5.635	25.053
Nabire	27.170	8.345	40.579
Kepulauan Yapen	19.400	5.874	15.142
Biak Numfor	23.235	6.454	32.914
Paniai	61.871	1.780	3.621
Puncak Jaya	69.824	166	7.020
Mimika	26.858	19.316	47.393
Boven Digoel	18.509	2.776	11.698
Mappi	26.534	1.793	12.193
Asmat	35.875	1.516	13.774
Yahukimo	105.934	151	6.201
Pegunungan Bintang	34.743	865	7.003
Tolikara	82.018	1.661	9.450
Sarmi	9.195	855	8.623
Keerom	21.151	2.625	8.887
Waropen	5.992	1.165	6.244
Supiori	6.119	669	2.643
Mamberamo Raya	9.321	47	1.165
Nduga	70.113	-	-
Lanny Jaya	47.932	-	1.070
Mamberamo Tengah	26.792	87	1.545
Yalimo	35.758	204	6.480
Puncak	60.922	518	6.313
Dogiyai	52.503	-	1.704
Intan Jaya	22.211	154	2.483
Deiyai	46.357	786	921
Kota Jayapura	9.485	16.590	106.320
Provinsi Papua	1.131.950	97.421	462.374

Ket : “-“ = Data tidak tersedia.

Lampiran 10. Indikator Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Pekerja Paruh Waktu Menurut Kabupaten/Kota, 2020

Kabupaten/Kota	Pekerja Paruh Waktu	Tingkat Pekerja Paruh Waktu	Share Perempuan Pada Pekerja Paruh Waktu (Persen)
Merauke	54.165	45,17	54,54
Jayawijaya	52.483	41,87	38,06
Kabupaten Jayapura	23.527	42,88	47,46
Nabire	25.571	33,60	47,03
Kepulauan Yapen	24.095	59,62	71,77
Biak Numfor	24.606	39,30	48,97
Paniai	66.311	98,57	97,63
Puncak Jaya	43.336	56,27	86,25
Mimika	32.704	34,95	48,96
Boven Digoel	17.526	53,14	69,15
Mappi	27.240	67,23	73,33
Asmat	19.555	38,22	45,09
Yahukimo	61.629	54,89	63,55
Pegunungan Bintang	25.861	60,69	76,38
Tolikara	85.334	91,63	92,02
Sarmi	8.668	46,42	60,60
Keerom	12.239	37,47	50,65
Waropen	5.805	43,32	59,83
Supiori	6.344	67,27	78,57
Mamberamo Raya	6.220	59,05	86,68
Nduga	27.303	38,94	35,94
Lanny Jaya	22.079	45,06	18,73
Mamberamo Tengah	13.152	46,27	13,00
Yalimo	18.423	43,41	42,94
Puncak	46.591	68,77	97,35
Dogiyai	29.586	54,58	53,10
Intan Jaya	17.321	69,71	80,15
Deiyai	27.830	57,90	46,67
Kota Jayapura	23.721	17,92	25,40
Provinsi Papua	849.225	50,20	56,47

Lampiran 11. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Jam Kerja, 2020

Kabupaten/Kota	0 Jam*	1-14 Jam	15-24 Jam
Merauke	2.964	14.808	20.233
Jayawijaya	784	3.217	13.985
Kabupaten Jayapura	1.576	4.394	10.909
Nabire	1.693	5.927	8.291
Kepulauan Yapen	1.183	3.630	12.746
Biak Numfor	2.967	3.822	10.849
Paniai	85	3.372	29.200
Puncak Jaya	0	6.947	10.139
Mimika	3.162	5.207	14.631
Boven Digoel	2.119	2.875	6.971
Mappi	2.307	6.063	13.741
Asmat	152	2.523	6.655
Yahukimo	335	1.824	20.479
Pegunungan Bintang	270	4.846	11.719
Tolikara	110	8.222	43.450
Sarmi	654	1.647	3.057
Keerom	271	3.750	4.096
Waropen	60	849	2.181
Supiori	217	1.629	3.224
Mamberamo Raya	102	1.769	2.606
Nduga	0	5.203	6.658
Lanny Jaya	0	1.424	3.338
Mamberamo Tengah	20	298	1.832
Yalimo	1.063	705	3.376
Puncak	469	954	37.165
Dogiyai	310	3.546	14.875
Intan Jaya	0	691	6.028
Deiyai	0	200	9.532
Kota Jayapura	2.987	5.921	8.030
Provinsi Papua	25.860	106.263	339.996

*sementara tidak bekerja

Lampiran 11. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Jam Kerja, 2020 (Lanjutan)

Kabupaten/Kota	25-34 Jam	35-44 Jam	45-54 Jam
Merauke	19.124	24.527	17.380
Jayawijaya	35.281	63.541	4.001
Kabupaten Jayapura	8.224	12.708	5.807
Nabire	11.353	21.549	21.298
Kepulauan Yapen	7.719	8.660	2.571
Biak Numfor	9.935	15.843	10.535
Paniai	33.739	876	0
Puncak Jaya	26.250	24.246	7.110
Mimika	12.866	19.044	13.247
Boven Digoel	7.680	6.065	3.965
Mappi	7.436	6.418	2.378
Asmat	10.377	19.342	7.884
Yahukimo	39.326	44.583	4.073
Pegunungan Bintang	9.296	11.461	2.358
Tolikara	33.662	6.424	1.002
Sarmi	3.964	4.983	2.271
Keerom	4.393	11.081	6.198
Waropen	2.775	3.859	2.534
Supiori	1.491	1.593	962
Mamberamo Raya	1.845	2.889	1.000
Nduga	15.442	38.205	4.541
Lanny Jaya	17.317	24.004	2.919
Mamberamo Tengah	11.022	14.893	359
Yalimo	14.342	22.350	606
Puncak	8.472	19.567	1.126
Dogiyai	11.165	15.317	8.553
Intan Jaya	10.602	5.690	1.837
Deiyai	18.098	19.658	576
Kota Jayapura	9.770	43.850	34.666
Provinsi Papua	402.966	513.226	171.757

Lampiran 11. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Jam Kerja, 2020 (Lanjutan)

Kabupaten/Kota	55-59 Jam	60 Jam Ke Atas
Merauke	9.724	11.148
Jayawijaya	865	3.687
Kabupaten Jayapura	3.002	8.251
Nabire	1.946	4.037
Kepulauan Yapen	776	3.131
Biak Numfor	1.695	6.957
Paniai	0	0
Puncak Jaya	318	2.000
Mimika	4.782	20.628
Boven Digoel	387	2.921
Mappi	1.402	775
Asmat	351	3.881
Yahukimo	522	1.144
Pegunungan Bintang	57	2.604
Tolikara	259	0
Sarmi	657	1.440
Keerom	961	1.913
Waropen	371	772
Supiori	20	295
Mamberamo Raya	0	322
Nduga	64	0
Lanny Jaya	0	0
Mamberamo Tengah	0	0
Yalimo	0	0
Puncak	0	0
Dogiyai	148	293
Intan Jaya	0	0
Deiyai	0	0
Kota Jayapura	7.890	19.281
Provinsi Papua	36.197	95.480

Lampiran 12. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Formal-Informal, 2020

Kabupaten/Kota	Formal	Informal
Merauke	28,87	71,13
Jayawijaya	16,01	83,99
Kabupaten Jayapura	27,87	72,13
Nabire	38,84	61,16
Kepulauan Yapen	29,47	70,53
Biak Numfor	32,07	67,93
Paniai	3,88	96,12
Puncak Jaya	4,31	95,69
Mimika	40,79	59,21
Boven Digoel	43,64	56,36
Mappi	20,16	79,84
Asmat	17,99	82,01
Yahukimo	4,58	95,42
Pegunungan Bintang	14,18	85,82
Tolikara	7,28	92,72
Sarmi	33,29	66,71
Keerom	22,20	77,80
Waropen	32,08	67,92
Supiori	20,88	79,12
Mamberamo Raya	7,53	92,47
Nduga	0,00	100,00
Lanny Jaya	2,18	97,82
Mamberamo Tengah	6,23	93,77
Yalimo	12,83	87,17
Puncak	10,05	89,95
Dogiyai	2,87	97,13
Intan Jaya	6,34	93,66
Deiyai	1,86	98,14
Kota Jayapura	56,47	43,53
Provinsi Papua	20,08	79,92

Lampiran 13. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota
Dan Jenis Kelamin, 2020

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Total
Merauke	3,34	3,58	3,43
Jayawijaya	2,86	2,09	2,51
Kabupaten Jayapura	10,39	10,23	10,33
Nabire	6,55	6,84	6,65
Kepulauan Yapen	4,23	6,72	5,30
Biak Numfor	13,79	5,83	10,38
Paniai	1,39	0,00	0,83
Puncak Jaya	2,45	0,00	1,50
Mimika	7,43	8,88	7,80
Boven Digoel	9,08	6,29	8,09
Mappi	7,35	3,04	5,77
Asmat	2,87	1,76	2,38
Yahukimo	4,26	3,39	3,88
Pegunungan Bintang	5,00	3,04	4,12
Tolikara	1,85	0,18	1,07
Sarmi	5,47	3,50	4,83
Keerom	2,40	2,82	2,56
Waropen	4,68	4,95	4,76
Supiori	4,58	3,51	4,12
Mamberamo Raya	3,16	1,45	2,55
Nduga	1,46	0,30	0,93
Lanny Jaya	1,81	0,23	0,90
Mamberamo Tengah	0,96	0,66	0,80
Yalimo	1,39	0,24	0,86
Puncak	0,76	0,32	0,56
Dogiyai	0,42	0,00	0,21
Intan Jaya	0,94	1,64	1,22
Deiyai	0,42	0,41	0,41
Kota Jayapura	10,33	13,86	11,62
Provinsi Papua	4,79	3,56	4,28

Lampiran 14. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2020

Kabupaten/Kota	Pendidikan Dasar Ke Bawah	Pendidikan Menengah	Pendidikan Tinggi
Merauke	1,00	5,19	5,71
Jayawijaya	2,90	1,40	3,47
Kabupaten Jayapura	1,52	13,44	13,44
Nabire	3,59	7,18	8,98
Kepulauan Yapen	0,97	7,45	10,59
Biak Numfor	5,38	13,03	9,63
Paniai	0,63	1,77	0,00
Puncak Jaya	1,33	1,48	4,05
Mimika	3,92	8,81	14,06
Boven Digoel	2,90	11,13	16,61
Mappi	5,96	6,14	0,00
Asmat	1,97	5,79	0,00
Yahukimo	3,38	5,75	4,68
Pegunungan Bintang	2,32	9,47	6,89
Tolikara	0,11	2,04	10,77
Sarmi	5,50	4,71	3,47
Keerom	0,36	3,12	7,65
Waropen	2,59	4,77	8,44
Supiori	2,85	3,76	9,69
Mamberamo Raya	3,60	1,15	6,61
Nduga	1,06	0,55	-
Lanny Jaya	0,85	1,33	0,00
Mamberamo Tengah	0,66	0,27	3,78
Yalimo	0,18	1,44	3,69
Puncak	0,55	0,00	1,33
Dogiyai	0,14	0,00	6,02
Intan Jaya	0,45	3,79	0,00
Deiyai	0,27	0,84	0,00
Kota Jayapura	9,73	11,78	12,10
Provinsi Papua	1,89	6,84	8,47

Ket : “-” = Data tidak tersedia.

Lampiran 15. Persentase Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2020

Kabupaten/Kota	Pendidikan Dasar Ke Bawah	Pendidikan Menengah	Pendidikan Tinggi
Merauke	12,56	69,92	17,52
Jayawijaya	65,96	17,25	16,79
Kabupaten Jayapura	3,83	77,01	19,16
Nabire	13,47	58,86	27,67
Kepulauan Yapen	7,52	59,82	32,65
Biak Numfor	14,70	72,26	13,04
Paniai	59,25	40,75	0,00
Puncak Jaya	72,65	13,16	14,19
Mimika	16,34	63,74	19,93
Boven Digoel	15,56	64,02	20,42
Mappi	65,24	34,76	0,00
Asmat	60,59	39,41	0,00
Yahukimo	67,61	29,50	2,89
Pegunungan Bintang	40,22	43,61	16,17
Tolikara	7,76	34,13	58,11
Sarmi	41,35	48,95	9,70
Keerom	5,13	65,62	29,25
Waropen	18,06	47,46	34,48
Supiori	29,88	40,25	29,88
Mamberamo Raya	70,29	21,01	8,70
Nduga	85,11	14,89	0,00
Lanny Jaya	78,15	21,85	0,00
Mamberamo Tengah	57,39	7,83	34,78
Yalimo	13,08	43,87	43,05
Puncak	85,79	0,00	14,21
Dogiyai	51,33	0,00	48,67
Intan Jaya	26,71	73,29	0,00
Deiyai	47,00	53,00	0,00
Kota Jayapura	10,05	61,34	28,62
Provinsi Papua	24,22	55,85	19,93

Ket: - : *Not Available*) Data tidak tersedia.

Lampiran 16. Persentase Setengah Penganggur Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2020

Kabupaten/Kota	Pendidikan Dasar Ke Bawah	Pendidikan Menengah	Pendidikan Tinggi
Merauke	50,17	41,45	8,39
Jayawijaya	56,14	36,47	7,39
Kabupaten Jayapura	38,74	49,34	11,91
Nabire	25,07	55,20	19,73
Kepulauan Yapen	54,07	33,77	12,16
Biak Numfor	33,50	54,99	11,51
Paniai	77,72	19,12	3,16
Puncak Jaya	81,44	15,98	2,57
Mimika	56,45	36,08	7,48
Boven Digoel	51,42	38,77	9,81
Mappi	71,80	25,08	3,12
Asmat	80,32	13,34	6,35
Yahukimo	79,93	17,31	2,76
Pegunungan Bintang	79,41	14,55	6,04
Tolikara	80,08	16,79	3,13
Sarmi	41,39	45,07	13,53
Keerom	34,89	56,25	8,87
Waropen	34,92	46,68	18,40
Supiori	49,65	40,79	9,55
Mamberamo Raya	51,61	45,63	2,77
Nduga	81,19	18,81	0,00
Lanny Jaya	68,59	26,26	5,15
Mamberamo Tengah	58,67	31,39	9,95
Yalimo	69,76	26,64	3,61
Puncak	88,23	6,63	5,15
Dogiyai	75,65	24,35	0,00
Intan Jaya	83,90	14,63	1,47
Deiyai	73,11	26,47	0,42
Kota Jayapura	12,82	53,25	33,94
Provinsi Papua	65,55	27,92	6,53

Lampiran 17. Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2020

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Total
Merauke	14.422	38.485	52.907
Jayawijaya	10.000	18.274	28.274
Kabupaten Jayapura	13.196	21.709	34.905
Nabire	7.371	21.055	28.426
Kepulauan Yapen	11.847	16.263	28.110
Biak Numfor	16.356	23.302	39.658
Paniai	22.003	26.306	48.309
Puncak Jaya	1.991	12.014	14.005
Mimika	17.446	40.986	58.432
Boven Digoel	2.742	8.916	11.658
Mappi	6.776	17.320	24.096
Asmat	4.003	7.673	11.676
Yahukimo	5.024	14.352	19.376
Pegunungan Bintang	3.407	3.549	6.956
Tolikara	3.929	3.226	7.155
Sarmi	2.653	6.939	9.592
Keerom	3.131	6.973	10.104
Waropen	2.291	6.929	9.220
Supiori	1.584	2.770	4.354
Mamberamo Raya	1.914	4.865	6.779
Nduga	1.835	919	2.754
Lanny Jaya	50.879	34.574	85.453
Mamberamo Tengah	6.113	1.039	7.152
Yalimo	2.705	2.583	5.288
Puncak	4.684	6.457	11.141
Dogiyai	4.994	6.565	11.559
Intan Jaya	3.201	7.992	11.193
Deiyai	2.883	2.687	5.570
Kota Jayapura	32.894	54.746	87.640
Provinsi Papua	262.274	419.468	681.742

Lampiran 18. Tingkat Ketidakaktifan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Total
Merauke	15,53	45,70	29,88
Jayawijaya	12,38	24,02	18,02
Kabupaten Jayapura	25,80	48,30	36,32
Nabire	12,45	41,50	25,85
Kepulauan Yapen	32,69	47,07	39,71
Biak Numfor	29,05	43,79	36,21
Paniai	35,22	49,01	41,59
Puncak Jaya	4,01	28,27	15,19
Mimika	18,78	61,16	36,54
Boven Digoel	10,59	41,20	24,52
Mappi	19,89	52,42	35,91
Asmat	12,11	24,72	18,22
Yahukimo	7,10	21,93	14,23
Pegunungan Bintang	12,23	15,08	13,53
Tolikara	7,28	6,82	7,06
Sarmi	16,69	52,12	32,83
Keerom	13,05	35,52	23,16
Waropen	19,00	61,67	39,59
Supiori	22,01	39,62	30,68
Mamberamo Raya	21,59	55,78	38,54
Nduga	4,56	2,76	3,75
Lanny Jaya	70,99	54,68	63,35
Mamberamo Tengah	31,06	6,44	19,97
Yalimo	10,54	11,51	10,99
Puncak	11,22	17,21	14,05
Dogiyai	15,51	19,49	17,55
Intan Jaya	17,43	44,43	30,79
Deiyai	10,24	10,46	10,35
Kota Jayapura	25,74	49,93	36,91
Provinsi Papua	20,16	36,53	27,84

Lampiran 19. Persentase Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2020

Kabupaten/Kota	Pendidikan Dasar Ke Bawah	Pendidikan Menengah	Pendidikan Tinggi
Merauke	43,29	46,18	10,53
Jayawijaya	57,02	30,84	12,13
Kabupaten Jayapura	26,10	59,18	14,72
Nabire	24,98	54,52	20,50
Kepulauan Yapen	41,16	42,51	16,34
Biak Numfor	28,35	57,59	14,06
Paniai	77,41	19,03	3,56
Puncak Jaya	81,48	13,27	5,24
Mimika	32,51	56,44	11,05
Boven Digoel	43,49	46,56	9,95
Mappi	63,20	32,69	4,11
Asmat	73,26	16,18	10,56
Yahukimo	77,71	19,89	2,40
Pegunungan Bintang	71,37	18,95	9,67
Tolikara	76,34	17,90	5,76
Sarmi	36,29	50,21	13,50
Keerom	36,33	53,89	9,78
Waropen	33,19	47,37	19,44
Supiori	43,20	44,10	12,70
Mamberamo Raya	49,81	46,83	3,36
Nduga	74,75	25,25	0,00
Lanny Jaya	82,73	14,70	2,57
Mamberamo Tengah	69,33	23,27	7,40
Yalimo	63,85	26,15	10,00
Puncak	87,37	6,68	5,96
Dogiyai	74,40	23,92	1,68
Intan Jaya	72,68	23,61	3,71
Deiyai	72,73	26,05	1,22
Kota Jayapura	12,00	60,51	27,49
Provinsi Papua	54,96	34,97	10,07

Lampiran 20. Tabulasi Silang Batas Kegiatan Formal dan Informal Berdasarkan Status Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan Utama

STATUS PEKERJAAN	JENIS PEKERJAAN UTAMA									
	Tenaga Profesional	Tenaga Kepemimpinan	Pejabat Pelaksana dan Tata Usaha	Tenaga Penjualan	Tenaga Usaha Jasa	Tenaga Usaha Pertanian	Tenaga Produksi	Tenaga Operasional	Pekerja Kasar	Lainnya
Berusaha sendiri	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Berusaha dibantu buruh tetap/Buruh dibayar	F	F	F	F	F	INF	F	F	F	INF
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/Buruh tidak dibayar	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Buruh/Karyawan/Pegawai	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pekerja Bebas di Pertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja Bebas di Nonpertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja Keluarga/Tak dibayar	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://papua.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA**

Jl. Dr. Sam Ratulangi Dok II Jayapura 99112
Telepon: 0967-534519, 533028 (Hunting) Fax: 536490
Email: bps9400@bps.go.id Homepage: papua.bps.go.id

ISBN 978-602-0963-75-4

